

RENCANA KERJA

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur

Telp (0725) 625030/Fax (0725) 625123

Sukadana

2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perikanan dan peternakan di Kabupaten Lampung Timur baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan ini mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPJPD maupun Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan 2021- 2026.

Upaya peningkatan hasil pembangunan bidang Perikanan dan Peternakan harus terus ditingkatkan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang terarah, agar seluruh sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Salah satu hal pokok yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan dengan berlandaskan pada potensi dan tantangan pembangunan yang dihandal melalui suatu perencanaan strategis. Dengan perencanaan kerja (RENJA) maka proses perencanaan dapat dilakukan dengan sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya wawasan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis sumberdaya yang tersedia dan usaha-usaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasil melalui proses umpan balik.

Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi dinas untuk menyusun program dan kegiatan tahun berikutnya sebagaimana tertuang dalam RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005 – 2025;
12. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, dimaksudkan untuk menjadi kerangka acuan penyusunan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Renja tahun 2025 ini, antara lain:

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi fungsi pemerintah daerah dan pusat baik antar daerah, maupun antar waktu;
2. Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan perikanan dan peternakan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Lampung Timur yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. Menjaga Kesiambungan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan per lima tahun.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Penetapan Kinerja (TAPJA) merupakan tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja (RENJA), dengan demikian penetapan kinerja rencana kerja dibuat untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran melalui tindakan yang terukur serta dapat dipertanggung-jawabkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Capaian Kinerja digunakan untuk melihat pencapaian sasaran dan target dari penetapan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024 serta hasil-hasil dari pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, dengan maksud untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Capaian Indikator Kinerja pada level sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 yang digambarkan dalam tabel berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan

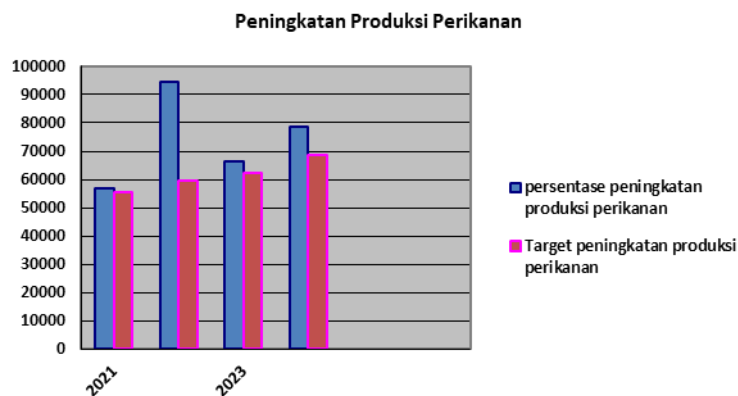
Indikator : Produksi Ikan (Ton)

Pada tahun 2021 produksi perikanan budidaya sebesar 7.512,82 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 49.303,11 ton. Total Produksi Perikanan tahun 2021 sebesar 56.815,93 ton. Pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya sebesar 9.040,73 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 85.656,93 ton, total produksi perikanan sebesar 94.697,66 ton. Pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap sebesar 57.194,23 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 8.954,97 ton, total produksi perikanan menurun menjadi sebesar 66.149,20 ton. Pada tahun 2024 produksi perikanan tangkap sebesar 69.308,57 ton dan data produksi perikanan budidaya sebesar 9.172,51 ton, Total produksi ikan sebesar 78.481,08 ton. Produksi Ikan Provinsi Lampung sebesar 393.033,66* Produksi perikanan Nasional sebesar 7.392.836*

ton (sumber data onedata KKP).

Tabel capaian kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2021 - 2024

	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024	Target rencana jangka menengah	Capaian kinerja
Produksi Ikan (Ton)	56.815,93	94.697,66	66.149,20	78.481,08	65.423,05	119%



Capaian kinerja Persentase peningkatan produksi perikanan sebesar 119%. Capaian kinerja Produksi perikanan melampaui target Renstra dan telah melampaui produksi tahun 2023. Dinas Perikanan dan Peternakan telah melaksanakan upaya-upaya peningkatan produksi perikanan dengan melaksanakan kegiatan diantaranya : Kegiatan Pengelolaan Budidaya ikan dengan pemberian bantuan sapras budidaya air payau 4 paket (DAK), bantuan sapras budidaya air tawar 5 paket (DAK), jalan produksi 2 lokasi, bantuan coolbox 10 paket, bantuan mesin kapal 9 unit, bantuan life jacket 5 paket, dan Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) 2 unit. Anggaran untuk mendukung produksi perikanan ini pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar Rp. 565.433.000,- realisasi 522.668.500 dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar Rp. 4.807.408.000,- realisasi Rp. 4.145.212.765,-

2. Sasaran : Meningkatnya Produksi Peternakan

Indikator : Produksi Daging (Ton)

Pada tahun 2021 produksi daging sebesar 36.953,7 ton. Pada tahun 2022 produksi daging sebesar 42.156,57 ton. Pada tahun 2023 produksi daging sebesar 28.117,18 ton. Pada tahun 2024 produksi daging sebesar 29.663,26 ton.

Tabel capaian kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Produksi Daging Tahun 2021 - 2024

	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024	Target rencana jangka menengah	Capaian kinerja
Produksi daging (Ton)	36.953,7	42.156,57	28.117,18	19.663,26	19.425,00	101%

Indikator : Produksi Telur (Ton)

Pada tahun 2021 produksi telur sebesar 27.129,597 ton. Pada tahun 2022 produksi telur sebesar 27.815,09 ton. Pada tahun 2023 produksi telur sebesar 33.794,95 ton. Pada tahun 2024 produksi telur sebesar 29.424,856. Capaian kinerja produksi telur lebih rendah daripada tahun lalu tetapi melampaui target Renstra karena pelaku usaha peternakan unggas semakin banyak. Dimana terdapat sentra ayam petelur di kecamatan Purbolinggo dan pelaku inovasi usaha telur herbal di kecamatan Way. Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan pencegahan penyakit zoonosis pada unggas dengan pemberian bantuan vaksin AI kepada pelaku usaha peternakan unggas, pemberian bantuan itik kepada 2 kelompok dan pemberian bantuan ayam petelur kepada 1 kelompok. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan anggaran Rp.6.884.785.000,- realisasi 2.280.773.400,- dan Program pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner dengan anggaran Rp.100.000.000,- realisasi Rp 71.774.490,-

Tabel capaian kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Produksi Telur Tahun 2021 – 2024

	Realisasi tahun 2021	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Realisasi tahun 2024	Target rencana jangka menengah	Capaian kinerja
Produksi daging (Ton)	27.129,597	27.815,09	33.794,95	29.424,856	27.825	105%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh seorang Sekretaris dan lima Kepala Bidang, 3 (1) orang Kepala Sub Bagian, 4 (empat) orang Kepala UPTD, 4 (empat) orang Kasubbag TU serta Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD

Dalam pelaksanaan Pembangunan Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Lampung Timur, kendala-kendala yang timbul dan harus menjadi bahan perhatian anantara lain :

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) masih sangat terbatas, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas baik dari unsur aparatur, peternak, petani ikan dan nelayan sebagai pelaksana kegiatan sehingga sulit melakukan transformasi alih teknologi

B. Modal

1. Pada Umumnya peternak, petani ikan, dan nelayan tidak memiliki modal yang cukup.
2. Masih lemahnya akses pelaku bisnis Perikanan dan Peternakan terhadap permodalan, teknologi dan pengolahan hasil perikanan dan peternakan serta tata niaga pemasaran hasil perikanan yang masih terlalu panjang.

C. Komoditas Peternakan dan Perikanan

1. Ketersediaan benih ikan yang belum memenuhi 5 syarat tepat, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat ukuran.
2. Kualitas bibit dan produktifitas ternak di Lampung masih rendah
3. Usaha penggemukan sapi potong masih tergantung pada bakalan impor
4. Degradasi pantai dan rusaknya irigasi pertambakan sebagai akibat kerusakan hutan mangrove, kerusakan terumbu karang dan penggunaan alat tangkap yang dilarang.

5. Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat membahayakan ekosistem perairan dan menurunkan stock populasi Sumber Daya Ikan (SDI) perairan Umum
6. Fluktuasi harga jual komoditas perikanan sangat tinggi, yang mengakibatkan timbulnya keraguan dari petani ikan/udang untuk melanjutkan usahanya.
7. Ketersediaan air yang tidak sepanjang tahun sehingga proses pembudidayaan terutama untuk perikanan air tawar dan air payau tidak dapat dilakukan sepanjang tahun.

D. Peralatan, Mesin, dan Bahan

1. Terbatasnya Prasarana pada PPI Kuala Penet dan BBI Way Curup serta prasarana penangkapan seperti armada yang berukuran kecil dan jenis alat tangkap.
2. Terbatasnya Prasarana dan tidak adanya operasional pada UPTD Peternakan Terpadu (Rumah Potong Hewan) sehingga belum bisa digunakan dengan maksimal.
3. Sebagian besar peralatan dan mesin peternakan masih tergantung barang impor, antara lain peralatan IB, peralatan kesehatan hewan, mesin pakan dan budidaya ternak.

E. Kebijakan Pemerintah

1. Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga menimbulkan gangguan keamanan
2. Pembangunan Kelautan dan Perikanan masih bersifat sektoral belum multi dimensi dan masih lemahnya data statistik yang mendukung
3. Akibat belum adanya sistem penataan ruang wilayah pesisir sehingga peruntukan lahan berupa zonasi-zonasi belum tertata dengan baik, sering terjadi konflik horizontal antar sesama nelayan
4. Pungutan retribusi di Kabupaten Lampung Timur masih dirasa berat oleh pelaku usaha.
5. Ditetapkannya Kawasan Minapolitan (Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai) berdasarkan SK Bupati Lampung Timur dan Kementerian

Kelautan dan Perikanan yang memerlukan Biaya yang tidak sedikit baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Pelaksanaannya didukung dengan beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (*topdown – bottom up*). Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 yang disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, menghasilkan Program terkait dengan pembangunan perikanan dan peternakan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
9. Program Perizinan Usaha Pertanian
10. Program Penyuluhan Pertanian

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Paradigma pembangunan perikanan dan peternakan ke depan tetap akan diarahkan untuk mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan (*pro-poor*), penyerapan tenaga kerja (*projob*), pertumbuhan (*pro-growth*), dan keberlanjutan (*pro-sustainability*), yang dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan penciptaan iklim usaha yang mendorong investasi di bidang perikanan dan peternakan (*pro-business*). Dalam kaitan ini kebijakan pembangunan perikanan dan peternakan menekankan pada pendayagunaan sumber daya perikanan dan peternakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi (kemakmuran), pemerataan kesejahteraan (keadilan sosial), dan terpeliharanya daya dukung ekosistem perairan dan stok sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya secara seimbang

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : “MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL”. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut. Kebijakan pemerintah di bidang pembangunan subsektor peternakan dengan mencanangkan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat tahun 2015-2025 dengan cara mengoptimalkan kesejahteraan peternak, ketersediaan dan mutu bibit, pakan ternak, serta jaminan kesehatan dan keamanan produk asal ternak. Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan perbibitan nasional untuk mendorong ketersediaan bibit dan melakukan pengawasan dalam pengadaan serta peredarannya secara berkelanjutan melalui Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah

(RPJPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2017 – 2020, maka dilakukan penyesuaian komponen yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan pengukuran kinerja melalui beberapa indikator kinerja utama yang pada akhirnya ditetapkan melalui Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja (TAPJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 berpijak dari arah kebijakan dan strategi nasional dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian disejalkan dengan arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur yang mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Peternakan saat ini maupun dalam lima tahun mendatang. Untuk itu arah kebijakan umum pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan sarana dan armada penangkapan, peningkatan dan pengembangan usaha budidaya dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran, peningkatan populasi peternakan, derajat kesehatan ternak, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi peternakan.
2. Meningkatkan produksi dan produktifitas usaha untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan dan peternakan (*pro poor, pro job, progrowth dan pro sustainability*).
3. Meningkatkan kualitas SDM dan sumber daya perikanan dan peternakan.
4. Mengembangkan dan *memperkokoh* industri, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan.
5. Meningkatkan kinerja, manajerial, *teknis* SDM, peralatan kerja, pendataan, pelayanan, koordinasi dengan *stake holder*, sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan bidang perikanan dan peternakan secara cepat, transparan, mudah dan sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
6. Mendorong minat investasi perikanan dan peternakan serta kemitraan usaha antar pelaku usaha (*pro business*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan dirancang secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan tujuan dan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya yang disejalkan dengan RPJMN, RPJPD, dan RENSTRA serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur. Tujuan dan sasaran merupakan penjelasan dari program prioritas serta target indikator kinerja dari Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lampung Timur dan RENSTRA Dinas Perikanan dan Peternakan dan Peternakan 2021 – 2026 yang merupakan tanggung jawab Dinas Perikanan dan Peternakan. Melalui perumusan tujuan dan sasaran akan diperoleh pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang terkandung di dalam RPJPD Kabupaten Lampung Timur dan RENSTRA Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur 2021 - 2026. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan perikanan mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan harus dijabarkan secara detail sehingga akan diperoleh rumusan program dan kegiatan yang terukur, spesifik, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3 Program dan Kegiatan

Implemetasi dari pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dan target yang telah diuraikan diatas dilakukan melalui tahapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 melalui 5 (lima) Program pembangunan perikanan yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan permasalahan serta potensi yang ada di Kabupaten Lampung Timur dan Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perikanan dan Peternakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan penyediaan barang cetak dan pengadaan
 - Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
7. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
 - Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan penyediaa jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data Informasi Sumber Daya Ikan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil
 - Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pebiayaan, keitraan usaha

- Sub Kegiatan Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat
- Sub Kegiatan Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk budidaya ikan di darat
- Sub Kegiatan Perencanaan dan pengembangan pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan ikan di darat.

IV. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan diusahakan dalam Kabupaten/Kota

V. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Kegiatan Penerbitan tanda daftar usaha pengelolaan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan makro
 - Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
2. Kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengelola dan pemasaran skala mikro dan kecil
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan/standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri
 - Peningkatan Persediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan
 - Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil

VI. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain

VII. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Pengembangan Prasarana Pertanian

VIII. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan, dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota
4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

IX. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

X. Program Penyuluhan Pertanian

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Uraian Program dan Kegiatan diatas telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta diselaraskan dengan Kegiatan Musrenbang dari tingkat kecamatan, usulan program dan kegiatan melalui Reses DPRD Kabupaten Lampung Timur (*Jaring Aspirasi Masyarakat*) dan beberapa usulan dari masyarakat melalui proposal serta usulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dari uraian Program dan Kegiatan diatas, terlihat secara detail Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025 yang terdiri dari 5 (lima) Program dan 55 (Lima puluh tiga) Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level sasaran beserta target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RENJA Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini adalah usulan Rencana Kinerja dalam rangka fasilitasi pembangunan Perikanan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur 2021 - 2026, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur serta Target dan Sasaran Pembangunan Perikanan Nasional yang ditetapkan melalui SKPD Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur. Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur merupakan dokumen perencanaan kinerja pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan kelautan dan perikanan yang bersumber anggaran dari APBD, APBD P, dan Dana lainnya Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan renja telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Kegiatan Musrenbang dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, rancangan awal RKPD, usulan program dan kegiatan melalui Reses DPRD Kabupaten Lampung Timur (*Jaring Aspirasi Masyarakat*) dan beberapa usulan dari masyarakat melalui proposal serta usulan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Yang menjadi bahan penyusunan dalam penetapan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan pagu indikasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan perikanan di Kabupaten Lampung Timur. Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang diinginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Dengan adanya Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan Perikanan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Plt. Kepala Dinas perikanan dan Peternakan
Kabupaten Lampung Timur,



DWI GIYARTI, S.Pi, M.M
NIP. 19780902 200212 2 006

MATRIKS RENJA 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
					Urusan Pemerintah Pilihan				Rp 13.799.829.923				Rp 53.555.100.000
	01				Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				Rp 13.799.829.923				Rp 52.255.100.000
	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya tertib administrasi dan kinerja pemda sesuai aturan dan tercapainya sasaran program penunjang pemerintah Daerah			Rp 9.742.421.923				Rp 9.265.000.000
	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 90.000.000				Rp 320.000.000
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Lampung Timur	4 Dokumen	Rp 40.000.000	APBD		4 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA APBD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA APBD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	Rp -	APBD		1 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-APBD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 35.000.000
		01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-APBD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	Rp -	APBD		1 Dokumen	Rp 35.000.000

		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lampung Timur	1 Laporan	Rp 15.000.000	APBD		36 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lampung Timur	1 Laporan	Rp 15.000.000	APBD		6 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah			Rp 7.762.043.923				Rp 6.200.000.000
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Lampung Timur	80 Orang/bulan	Rp 7.229.643.923	APBD		33 Orang	Rp 5.500.000.000
		01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lampung Timur	20 Dokumen	Rp 432.400.000	APBD		22 Orang	Rp 450.000.000
		01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lampung Timur	6 Dokumen	Rp 70.000.000	APBD		6 Jenis	Rp 50.000.000
		01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lampung Timur	12 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD		4 Orang	Rp 50.000.000
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lampung Timur	1 Laporan	Rp 10.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Lampung Timur	2 Dokumen	Rp 10.000.000	APBD		3 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lampung Timur	18 Laporan		APBD		26 Dokumen	Rp 50.000.000
		01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			Rp 67.500.000				Rp 120.000.000

			2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lampung Timur	12 Laporan	Rp 10.000.000	APBD		12 Laporan	Rp 50.000.000
			2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Dearah pada SKPD	Kab. Lampung Timur	1 Laporan	Rp 57.500.000	APBD		3 Orang	Rp 70.000.000
		01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian			Rp 8.500.000				Rp 250.000.000
			2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Lampung Timur	1 Dokumen	Rp 8.500.000	APBD		1 dokumen	Rp 50.000.000
			2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Lampung Timur	20 Orang	Rp -	APBD	Rencana Aksi Pengembangan SDM	20 Orang	Rp 200.000.000
		01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Logistik Kantor			Rp 262.000.000				Rp 365.000.000
			2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Lampung Timur	1 paket	Rp 5.000.000	APBD		3 Buah	Rp 100.000.000
			2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kator yang disediakan	Kab. Lampung Timur	1 paket	Rp 20.000.000				
			2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Lampung Timur	1 paket	Rp 15.000.000	APBD		5 Buah	Rp 20.000.000
			2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Lampung Timur	1 paket	Rp 10.000.000	APBD		12 bln	Rp 20.000.000
			2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Lampung Timur	1 paket	Rp 20.000.000	APBD		50000 Lembar	Rp 15.000.000
			2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Lampung Timur	20 Buah	Rp 12.000.000	APBD		20 Buah	Rp 10.000.000
			2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lampung Timur	50 Laporan	Rp 180.000.000	APBD		333 Kali	Rp 200.000.000

		01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Jumlah Barang Milik Daerah			Rp	-			Rp	100.000.000
			2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubel yang disediakan	Kab. Lampung Timur	3 unit	Rp	-	APBD		15 Unit	Rp 100.000.000
		01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Umum Kantor			Rp	1.097.378.000			Rp	860.000.000
			2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lampung Timur	100 Laporan	Rp	2.500.000	APBD		1500 Buah	Rp 10.000.000
			2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik yang disediakan	Kab. Lampung Timur	12 Laporan	Rp	74.878.000	APBD		6 Rek	Rp 50.000.000
			2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Lampung Timur	12 Laporan	Rp	1.020.000.000	APBD		44 Orang	Rp 800.000.000
		01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik Daerah dalam Kondisi Baik			Rp	455.000.000			Rp	1.050.000.000
			2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Lampung Timur	35 Unit	Rp	450.000.000	APBD		35 Unit	Rp 300.000.000
			2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Lampung Timur	15 Unit	Rp	5.000.000	APBD		40 Unit	Rp 50.000.000
			2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Lampung Timur	1 unit	Rp	-	APBD		1 Paket	Rp 700.000.000
3					Pemerintahan Pilihan									
3	25				Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan				Rp	757.408.000				Rp 11.400.000.000

3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan, Alat Tangkap dan Hasil Produksi Perikanan Tangkap			Rp 20.433.000				Rp 3.700.000.000
3	25	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Tempat Penangkapan dan Hasil Produksi Perikanan Tangkap			Rp -				Rp 2.200.000.000
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam satu Kabupaten/kota yang tersedia	Kab. Lampung Timur	1 dokumen	Rp -	APBD		100%	Rp 200.000.000
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia	Kab. Lampung Timur	50 Unit	Rp -	DAK		50 Unit	Rp 1.500.000.000
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Lampung Timur	200 Unit	Rp -	DAK		50 Unit	Rp 500.000.000
3	25	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Rp 20.433.000				Rp 1.000.000.000
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya	Kab. Lampung Timur	20 Kelompok	Rp 20.433.000				Rp 500.000.000
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kab. Lampung Timur	20 Kelompok	Rp -	APBD	Petani Berjaya	1000 Orang	Rp 500.000.000
3	25	03	2.03		Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Rp -				Rp 500.000.000
3	25	03	2.03	02	Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Labuhan Maringgai, Way Bungur	3 Bangunan	Rp -	APBD		3 Bangunan	Rp 500.000.000

3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (tonase), Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Sarana dan Prasarana Budidaya			Rp 536.975.000				Rp 3.600.000.000
3	25	04	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan (Pokdakan) yang terfasilitasi mengikuti pengembangan kapasitas			Rp -				Rp 1.100.000.000
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Kab. Lampung Timur	10 Pokdakan	Rp -	APBD		10 Pokdakan	Rp 500.000.000
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha bagi kelompok usaha (pokdakan)	Kab. Lampung Timur	100 pembudidaya	Rp -	APBD	Rencana aksi pemberian subsidi asuransi bagi pembudidaya	100 pembudidaya	Rp 300.000.000
3	25	03	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya pendampingan bagi Kelompok Usaha (Pokdakan) untuk memperoleh kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kab. Lampung Timur	10 Pokdakan	Rp 20.433.000	APBD	Rencana Aksi Pengembangan SDM melalui Apresiasi Budidaya + Petani Berjaya	10 Pokdakan	Rp 300.000.000
3	25	04	2.04		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terpenuhinya jumlah sarana dan prasarana budidaya, jumlah data statistik budidaya yang tervalidasi, dan peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (tonase)			Rp 536.975.000				Rp 2.500.000.000
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota (data statistik perikanan budidaya)	Kab. Lampung Timur	1 Dokumen	Rp -	APBD	melalui pengumpulan dan pengolahan data produksi budidaya	100%	Rp 100.000.000

3	25	04	2.04	02	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Pokdakan)	Kab. Lampung Timur	8 Unit	Rp	536.975.000	DAK, APBD + Pokir	Melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Prasarana Untuk Kelompok Pembudidaya Ikan	4 Kelompok	Rp 1.000.000.000
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lampung Timur	10 Unit	Rp	-	DAK + Pokir Perikanan	Melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Sarana Untuk Pokdakan	4 Kelompok	Rp 1.000.000.000
4	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	Kab. Lampung Timur	1 dokumen	Rp	-	APBD		1 dokumen	Rp 400.000.000
3	25	05			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok Pengawas Perikanan			Rp	-				Rp 1.000.000.000
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Kelompok Pengawas Perikanan Tangkap dan Budidaya Serta Tingkat Pengawasannya			Rp	-				Rp 1.000.000.000
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Kab. Lampung Timur	2 dokumen	Rp	-	APBD		24 Pokmaswas	Rp 500.000.000
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Kab. Lampung Timur	2 dokumen	Rp	-	APBD		24 Pokmaswas	Rp 500.000.000

3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				Rp	200.000.000				Rp	3.100.000.000
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				Rp	-				Rp	300.000.000
3	25	06	2.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Kab. Lampung Timur	1 dokumen	Rp	-	APBD		1 dokumen	Rp	300.000.000
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil	Terpantaunya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita			Rp	-				Rp	200.000.000
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan / Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Kab. Lampung Timur	10 Kelompok/unit usaha	Rp	-	APBD		15 Kelompok	Rp	200.000.000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dan Jumlah Jumlah Konsumsi Ikan perkapita			Rp	200.000.000				Rp	2.600.000.000
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan ikan untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan ikan untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lampung Timur	40.000 ton	Rp	100.000.000	APBD	stunting dan lomba masak ikan	15 Kelompok	Rp	1.300.000.000
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lampung Timur	15 pelaku usaha/Kelompok	Rp	100.000.000	APBD		15 Kelompok	Rp	1.300.000.000

					Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				Rp 3.300.000.000				Rp 42.990.100.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase rata-rata peningkatan populasi ternak	24 kecamatan	12-15%	3.300.000.000,00	APBD		12-15%	41.550.100.000,00
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan sarana prasarana peternakan	24 kecamatan	24 kecamatan	-	APBD		24 kecamatan	100.000,00
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan penggunaan sarana pendukung pendukung kegiatan Pertanian	24 kecamatan	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	100.000,00
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mutu bibit ternak yang meningkat	24 kecamatan	100%	-	APBD		100%	500.000.000,00
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	24 kecamatan	12 Laporan	-	APBD	pengembangan SDM	100 kelompok	500.000.000,00
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	24 kecamatan	24 kecamatan	-	APBD		24 kecamatan	250.000.000,00
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan Yang Beredar	24 kecamatan	24 Laporan	-	APBD	Pemeriksaan, pengawasan dan Pengadaan obat hewan	24 laporan	250.000.000,00
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pengawasan dan pembinaan produksi benih/bibit pakan dan hijauan ternak	24 kecamatan	100%	50.000.000,00	DAK dan APBD		100%	800.000.000,00

3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	24 kecamatan	12 Laporan	50.000.000,00	APBD	25 chopper (tani berjaya)	12 Laporan	800.000.000,00
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penambahan jumlah ternak yang berasal dari daerah lain	24 kecamatan	20000 ekor	3.250.000.000,00	APBD		25000 ekor	40.000.000.000,00
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/kota lain	24 kecamatan	20000 ekor	3.250.000.000,00	APBD		25000 ekor	40.000.000.000,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase rata-rata peningkatan populasi ternak	24 kecamatan	3-5%	-	APBD		4-6%	120.000.000,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan pengawasan prasarana dan database peternakan	24 kecamatan	100%	-	APBD		100%	120.000.000,00
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	24 kecamatan	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	120.000.000,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	24 kecamatan	90%	-	APBD		90%	620.000.000,00
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyakit hewan menular ternak yang tertangani	24 kecamatan	24 kecamatan	-	APBD		24 kecamatan	200.000.000,00
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	24 kecamatan	288 laporan	-	APBD	Pelayanan terpadu kesehatan hewan dan vaksinasi	288 laporan	200.000.000,00

3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengamatan, penyidikan, dan pengawasan penyakit menular ternak pada hewan	24 kecamatan	24 kecamatan	-	APBD		24 kecamatan	100.000.000,00
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	24 kecamatan	24 laporan	-	APBD	Penyidikan penyakit hewan, dan pengambilan sampel penyakit dan kesmavet	24 laporan	100.000.000,00
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner yang baik	24 kecamatan	100%	-	APBD		100%	200.000.000,00
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	2 UPTD	12 laporan	-	APBD	Operasional UPTD, Pelayanan kesehatan hewan, pengawasan RPH	12 laporan	200.000.000,00
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Persyaratan teknis kesmavet	24 kecamatan	24 kecamatan	-	APBD		24 kecamatan	120.000.000,00
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	24 kecamatan	24 Laporan	-	APBD	Fasilitasi NKV, pengawasan pemotongan pada hari besar keagamaan pada 24 kecamatan	24 laporan	120.000.000,00
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan usaha peternakan berizin	24 kecamatan	85%	-	APBD		90%	300.000.000,00

3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Peningkatan pelayanan penerbitan izin usaha peternakan	24 kecamatan	100%	-	APBD		100%	300.000.000,00
3	27	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	24 kecamatan	50 Dokumen	-	APBD		50 Dokumen	300.000.000,00
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kualitas kelompok ternak	24 kecamatan	6%	-	APBD		7%	400.000.000,00
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan jumlah kelompok ternak dengan administrasi kelembagaan yang baik	24 kecamatan	40 kelompok	-	APBD		40 kelompok	400.000.000,00
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	24 kecamatan	40 unit	-	APBD	pendampingan asuransi dan pengembangan usaha ternak (tani berjaya)	40 unit	400.000.000,00
					JUMLAH TOTAL				Rp 13.799.829.923				Rp 63.655.100.000

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. BUAY MELINTING SUKADANA ILIR TELP. (0725) 625102
SUKADANA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 telah selesai disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 tersebut, merupakan salah satu bagian dari dokumen rencana yang diwajibkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, program-program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan pencapaian kinerja.

Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Dispusip Kabupaten Lampung Timur tahun 2024, yang telah memberikan waktu, pikiran dan tenaga sehingga Renja ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan, dan semoga dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Sukadana,

2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



MOHAMMAD RIDWAN SH, MM
NIP. 19800317 200212 1 010

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispusip.....	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dispusip.....	33
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	36
BAB IV : PENUTUP	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan.

Setiap Perangkat Daerah akan berupaya untuk menyusun Renja dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Renja dengan dokumen perencanaan lainnya secara komprehensif. Sehingga Renja Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrument yang tidak terlepas dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lampung Timur (Dispussip) sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyusun Renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dispussip Kabupaten Lampung Timur melakukan penyusunan Renja Tahun 2025 yang berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD tahun 2025, yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Timur.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- d. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- g. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 07 tahun 2021;
- o. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksudnya adalah :

Untuk memberikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan selama periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.

1.3.2 Tujuannya adalah :

1.3.2.1 Mewujudkan tertib sistem perencanaan pembangunan daerah

1.3.2.2 Menciptakan perencanaan yang konsisten dan sinergis

1.3.2.3 Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2021-2026

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispusip Tahun 2025

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2021-2026

Dalam rangka meningkatkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada tahun 2025, sangat dibutuhkan evaluasi Renja dengan cara melakukan perbandingan atau membuat sandingan data antara target capaian kinerja Renstra sesuai atau sampai dengan periode akhir Renstra, dibandingkan atau disandingkan dengan data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispusip Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.1. sebagai berikut:

TABEL 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Dispusip Kabupaten Lampung Timur s.d. Tahun 2023

No	Sasaran	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%
				6			8		13 = 9+10+11+12		15 = 7 + 13		16 = 15/6*100	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5 Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah bidang perpustakaan	100	persen	14.024.150	100	5789346	100	5789346	100	11133565	100	79,388519
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	persen	11.324.200	100	5212298	100	5212298	200	10386515	100	91,719636
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas	100	persen	75.000	12	1516	100	1516	100	3817	100	5,0893333
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas yang disusun	2	dok	20.000	2	1516		1516	2	1716	100	8,58
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	1	dok	20.000		0		0	1	965	100	4,825
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Dinas yang disusun	1	dok	35.000		0		0	1	1136	100	3,2457143
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan Dinas	100	persen	6.815.000	100	4337612	100	4337612	200	9005949	200	132,14892

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang	6.000.000	36	4223802	3	4223802	39	8735579	108,33333	145,59298
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dok	700.000	12	76910	3	76910	15	197080	125	28,154286
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dok	48.000	12	36900	4	36900	20	73290	166,66667	152,6875
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	50.000	-	0	0	0	-	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	dok	17.000	-	0	0	0	-	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum Dinas	100	%	988.000	100	135139	100	135139	300	241826	300	24,476316
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	78.000	1	1500	1	1500	9	3900	900	5

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	paket	90.000	2	19366	2	19366	34	30719	1700	34,132222
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	paket	146.000	2	21977	2	21977	14	34734	700	23,790411
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	104.000	2	21496	2	21496	4	51166	200	49,198077
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	laporan	570.000	20	70800	0	70800	30	121307	60	21,28193
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan dinas	100	%	2.506.200	100	481575	100	481575	400	792075	400	31,604621
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	132.000		0	0	0	6	1500	300	1,1363636
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	332.000	12	40988	9	40988	21	76837	175	23,143675
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	625.000		0	0	0	1	886	100	0,14176
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1.417.200	12	440587	12	440587	154	875261	1283,3333	61,759879

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	940.000	100	256456	100	256456	400	342848	400	36,473191
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	unit	755.000	16	234856	16	234856	32	321122	200	42,532715
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	paket	113.000	3	11600	0	11600	10	21100	333, 333 33	18,672566
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	72.000	1	10000	0	10000	1	25000	100	34,722222
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan	0,35	IMB	363.000	0,31	507295	0,3	507295	1	634287	171, 428 57	174,73471
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota	12.00 0	buku	100.000	9.754	149176	195 08	149176	29.26 2	266551	243, 85	266,551
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) dan Jejaring Perpustakaan	1	layanan	350.000	1	79710	0	79710	-	79710	0	22,774286

	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	264	perpustakaan	140.250	1	1444	0	1444	1	9187	0,37 878 79	6,5504456
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	264	perpustakaan	57.000	20	961	0	961	10	8267	3,78 787 88	14,503509
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1	layanan	662.480	1	63207	1	63207	2	160640	200	24,248279
	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	10.000	eksemplar	440.000		0	0	0	100	2205	1	0,5011364
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	10.000	eksemplar	325.000	500	3854	0	3854	100	6542	1	2,0129231

	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung perpustakaan	0,35	IMB	263.000	0,31	358119	1	367736	174.285 71	139.82357
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	101	lokus	132.000	101	277916	30	288113	29,7 029 7	218.26742
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2	orang	131.000	2	80203	-	80203	0	61.223664
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlaksananya Pelestarian naskah kuno	100,0 0	persen	2.336.950	60	69753	120	112763	120	4.8252209
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang dimiliki daerah	100	persen	270.000	60	0	120	5327	120	1.972963
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	4	eksemplar	270.000	4	0	8	5327	200	1.972963
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah bidang Kearsipan	100,0 0	persen	2.066.950	100,0 0	69753	100	107436	100	5.1978035
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Retrival	30	menit	1.187.250	30	65384	90	95136	300	8.0131396
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis daerah yang dikelola	100	%	140.250	100	17095	200	24838	200	17.709804

	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	300	berkas	189.430	300	5870	0	5870	10	13677	3,33 333 33	7,2200813
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	300	berkas	355.000	300	5427	0	5427	2	8617	0,66 666 67	2,4273239
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan arsip statis daerah	100	%	750.000	100	4862	100	4862	200	9756	200	1,3008
	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1	arsip	500.000	1	4862	0	4862	-	4862	0	0,9724
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300	arsip	250.000		0	0	0	300	4894	100	1,9576
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang ada di Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100	%	297.000	100	43427	100	43427	200	60542	200	20,364512
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1	pengguna	165.000	1	27064	0	27064	1	37408	100	22,671515

	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1	laporan	132.000	1	16363	0	16363	1	23134	100	17,525758
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip terselamatkan	100	%	659.780	50	2061	50	2061	100	3121	100	0,4730365
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun		100	%	100.000	100	2061	100	2061	100	2061	100	2,061
	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1	dok	100.000	1	2061	0	2061	-	2061	0	2,061
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis dan arsip hasil alih media yang di autentifikasi	100	%	559.780		0	0	0	100	1060	100	0,1893601
	Penilaian dan Penetapan Autentikasi Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentikasi Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	300	arsip	559.780		0	0	0	20	1060	6,66 666 67	0,1893601
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Pengelolaan arsip secara baku	100	%	219.920	25	2308	25	2308	50	9179	50	4,1737905

	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang tersedia	100	%	219.920	1	2308	0	2308	1	9179	1	4,1737905
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5	dok	40.000		0	0	0	1	3541	20	8,8525
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	5	arsip	179.920	1	2308	0	2308	1	5638	20	3,1336149

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renja Dispusip Kabupaten Lampung Timur sesuai tabel 2.1. diatas, untuk urusan wajib bidang perpustakaan dan kearsipan telah mempunyai program dan indikator program yang cukup jelas. Secara periodik realisasi kinerja dalam rangka target capaian kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2024, masih disebut wajar sesuai pendekatan *money follow function* artinya fungsi-fungsi yang berada pada masing-masing unit/satuan kerja di Dispusip Kabupaten Lampung Timur yang sudah dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

Sedangkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2.sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN		%
		Rencana	Realisasi	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00	7.843.500,00	100%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.373.746.437,00	4.225.875.642,00	97%
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.730.000,00	62.130.000,00	96%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	18.720.000,00	18.720.000,00	100%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.577.085,00	4.488.000,00	98%
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.199.775,00	10.530.000,00	94%
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.563.101,00	22.542.300,00	96%
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.871.466,00	25.870.000,00	100%
9	Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan Konsultasi SKPD	107.650.000,00	106.287.015,00	99%
10	Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.941.102,00	51.448.710,00	97%
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	557.208.480,00	490.340.480,00	88%
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	267.089.000,00	184.526.828,00	69%
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.418.900,00	14.397.000,00	100%
14	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.196.400,00	69.950.000,00	100%
15	Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	69.671.430,00	67.185.400,00	96%
16	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	20.000.000,00	19.615.200,00	98%
17	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	120.230.000,00	109.190.825,00	91%
18	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	80.340.000,00	63.045.650,00	78%
19	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	51.902.500,00	51.231.300,00	99%
20	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	25.000.000,00	24.959.000,00	100%
21	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	55.000.000,00	54.526.915,00	99%
22	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	108.681.230,00	100.058.000,00	92%
23	Penyediaan Informasi, Akses Layanan Kearsipan Tingkat Kabupaten/ Kota melalui JIKN	55.773.647,00	55.491.075,00	99%
24	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	75.000.000,00	65.691.612,00	88%

Sesuai hasil evaluasi kinerja Tahun 2024 seperti yang diuraikan pada Tabel 2.2. diatas, maka kategori kinerja Renja Dispusip Tahun 2024 adalah Baik (nilai 80–100 =baik).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan perpustakaan dan urusan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar. Dalam kerangka urusan ini Dispusip Kabupaten Lampung Timur memiliki tugas dan tanggungjawab yang setara dengan perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dispusip Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pelayanan perpustakaan maupun pelayanan kearsipan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dispusip Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pencapaian Pelayanan Kinerja Dispusip Kabupaten Lampung Timur

No	Indikator	Realisasi Target Renstra Daerah					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	5,41	51,57	45,11		
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	54,01	52,65	58,74		
3	Nilai Pengawasan Kearsipan	C	C	C	CC		
4	Nilai Digitalisasi Kearsipan	B	B	B	B		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Timur

a. Kedudukan Dispusip Kabupaten Lampung Timur

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, Dispusip Kabupaten Lampung Timur kategorinya tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan Renstra Dispusip Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang pencapaiannya akan diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja program.

Kedudukan Dispusip Kabupaten Lampung Timur yang jelas dalam pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi serta adanya Renstra tersebut, telah membuka peluang untuk melakukan perannya berkaitan dengan isu strategis bidang perpustakaan yaitu pemberdayaan perpustakaan dalam mencerdaskan masyarakat, dan bidang kearsipannya sebagai pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dispusip Kabupaten Lampung Timur

Dilihat dari kedudukan maupun kategori tipe A, saat ini Dispusip Kabupaten Lampung Timur tengah menghadapi suatu kondisi lingkungan eksternal yaitu era globalisasi yang sangat cepat, tingkat keterbukaan informasi yang tinggi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat dan murah, sehingga sangat diperlukan pendekatan pengembangan organisasi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan maupun perkembangan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Timur memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan dan arsip, tugas dekonstrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan pengembangan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis dalam pembinaan perpustakaan;

- c. pelaksanaan dalam penyusunan Penulisan Buku (Bibliografi) Pokok Pembicaraan(Subyek), Tidak Berbentuk(Abstrak) dan Bahan Bacaan(Literatur) Pengertian(Sekunder) lainnya;
- d. pengadaan dan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan penyajian bahan pustaka karya cetak serta karya rekam;
- e. pelaksanaan kerjasama dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan sumber daya manusia dibidang perpustakaan dengan instansi yang terkait;
- f. pelaksanaan kerjasama dibidang perpustakaan dan informasi dengan instansi lain;
- g. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
- h. penyelenggaraan pembinaan dibidang kearsipan di daerah;
- i. penyelenggaraan Perolehan (Akuisi) arsip dan pengolahan, penyimpanan dan perawatan serta pelayanan arsip in-aktif di daerah;
- j. penyelenggaraan penilaian dan Perolehan(Akuisi) serta pengolahan, penyimpanan dan perawatan serta pelayanan arsip statis;
- k. pembinaan pengendalian, pengawasan dan koordinasi sumber daya manusia dan sistem kearsipan;
- l. pengolahan, pelestarian dan layanan informasi serta penerbitan naskah sumber arsip;
- m. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok jabatan fungsional substansi keuangan.
 - Kelompok jabatan fungsional substansi perencanaan.
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dan Layanan Perpustakaan
 Pengelompokan jabatan fungsionalnya meliputi :
 - Kelompok jabatan fungsional substansi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
 - Kelompok jabatan fungsional substansi Layanan Perpustakaan
 - Kelompok jabatan fungsional substansi Pengembangan Minat Baca.
- d. Bidang Perpustakaan Deposit, Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka
 Pengelompokan jabatan fungsionalnya meliputi :
 - Kelompok jabatan fungsional substansi Deposit.
 - Kelompok jabatan fungsional substansi Akuisisi.

- Kelompok jabatan fungsional substansi Pengolahan Bahan Pustaka.

e. Bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan

Pengelompokan kelompok jabatan fungsionalnya, meliputi :

- Kelompok jabatan fungsional substansi Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah, Perusahaan dan Organisasi Kemasyarakatan;
- Kelompok jabatan fungsional substansi Layanan Informasi dan Jasa Kearsipan;
- Kelompok jabatan fungsional substansi Pemanfaatan Arsip Statis.

f. Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis

Pengelompokan kelompok jabatan fungsionalnya meliputi :

- Kelompok jabatan fungsional substansi Alih Media dan Reproduksi Arsip Vital dan Arsip Aset Nasional;
- Kelompok jabatan fungsional substansi Pengelolaan Arsip Inaktif dan Arsip Statis;
- Kelompok jabatan fungsional substansi Akuisisi dan Preservasi Kearsipan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Dispusip Kabupaten Lampung Timur dirancang hanya dengan menggunakan 2 (dua) level eselonnya itu eselon II (Kepala Dinas) dan Eselon III (Kepala Bidang), ditambah dengan level non eselon (Para Pejabat Fungsional) dan tanpa memasukan eselon IV (Kepala Seksi/Kepala Subbagian) pada masing-masing bidang teknis, sedangkan di Sekretariat tetap memasukan eselon IV.

Berdasarkan susunan organisasi yang sudah ditetapkan tersebut, Dispusip Kabupaten Lampung Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya memiliki struktur organisasi untuk level jabatan struktural yang minimal hanya dua level yaitu level eselon II dan level eselon III.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan dengan melibatkan peran aktif para pejabat fungsional terutama pejabat fungsional pustakawan, pejabat fungsional arsiparis secara efektif.

Permasalahan umum yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi Dispusip Kabupaten Lampung Timur saat ini adalah keterbatasan jumlah para pejabat fungsional yang difungsikan pada masing-masing bidang yang dipimpin oleh pejabat struktural, kondisinya belum merata. Akibat dari kondisi tersebut, tingkat pengendalian kinerja yang menjadi tanggungjawab para pejabat struktural menjadi kurang mencukupi dalam memacu akselerasi pencapaian sasaran kinerja organisasi. adalah :

Permasalahan pelaksanaan Program Pengembangan Kearsipan adalah :

- a. Belum tertibnya implementasi penyusutan arsip oleh masing-masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip sehingga penyelenggaraan kearsipan pemerintah

daerah belum optimal;

- b. Keberadaan records centre sebagai tempat yang menjadi pusat penyimpanan arsip inaktif pada masing-masing perangkat daerah belum optimal sehingga masih sering terjadi arsip bertumpuk tidak tertib pada berbagai unit kerja;
- c. Apresiasi terhadap penelusuran dan penyelamatan arsip bernilai kesejarahan masih rendah;
- d. Perangkat daerah sebagai pencipta arsip belum mengadakan sarana dan prasarana kearsipan secara efektif;
- e. Pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap kearsipan masih rendah.

Sedangkan permasalahan Program Pengembangan Budaya Baca adalah :

- a. Pengadaan bahan perpustakaan belum optimal;
 - b. Pembudayaan minat baca untuk usia dini belum optimal;
 - c. Pembudayaan kegemaran membaca masyarakat belum optimal.
- c. Tantangan dan Peluang Peningkatan Kinerja Dispusip Kabupaten Lampung Timur

Tantangan dan Peluang Dispusip Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan Visi dan Misinya adalah :

- a. Peluang perpustakaan sangat berkaitan secara langsung dengan bidang pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang mesti mendapatkan pelayanan secara optimal. Bidang pendidikan tentu akan berkembang maju apabila didukung oleh perpustakaan yang modern, dan dapat diandalkan. Indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya tingkat pendidikan yang berkualitas dengan unsure pendukungnya yaitu perpustakaan. Oleh karena itu penyelenggaraan perpustakaan dapat terus berkembang seiring dengan dinamika pengembangan pendidikan;
 - b. Peluang arsip sebagai bahan utama yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Informasi yang berupa arsip tentu tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan data untuk perencanaan, pengawasan, dan pelaporan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dapat terjadi apabila didukung oleh penyelenggaraan kearsipan yang tertib oleh masing-masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip.
 - c. Tantangan bidang perpustakaan dan kearsipan untuk masa depan adalah kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat mestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan pelayanan perpustakaan.
- d. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/International

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026, bahwa Visi Kabupaten Lampung Timur yaitu Rakyat Lampung Timur Berjaya. Visi tersebut disertai dengan penetapan Misi-nya sebagai berikut:

1. Meningkatkan program petani berjaya.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan.
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan *good governance* (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab.
7. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan lokal.
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas.

Melihat Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Timur mempunyai peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan amanah untuk menjalankan Misi ke-6 (enam) yaitu Meningkatkan *good governance* (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Lampung Timur melalui pelayanan pendidikan yang baik serta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan.

Berkaitan dengan Visi dan Misi yang sudah ditetapkan tersebut, untuk mencapai pembangunan daerah urusan perpustakaan dan urusan kearsipan termasuk urusan wajib yang semestinya mampu memberikan kontribusi atau dampak terhadap Visi dan Misi tersebut.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024, dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.4. sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan 2024					
Ko de	Prog./Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ko de	Prog./Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3 Sukadana	4	5	6	1	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3 Sukadana	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Sukadana					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Sukadana	Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah bidang perpustakaan	12	6.744.402.041
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah	12 bln			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sukadana	Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah	12	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sukadana	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas	100%			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sukadana	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas	100	20.958.115
1	Kinerja Perangkat Daerah	Sukadana	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Dinas yang disusun	1 dok	8.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sukadana	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas yang disusun	1	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Sukadana	Jumlah Dokumen Renja Dinas yang disusun	1 dok	4.000.000	1	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Sukadana	Jumlah laporan capaian kinerja	1	13.704.400
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Sukadana	Jumlah Dokumen	1 dok		2					3.860.100

		tahun (Dokumen)					Bulan/Triwulan/Sem esteran SKPD					
		Sukadana					Administral Umum Perangkat Daerah	Sukadana	Terlaksananya administrasi Umum Dinas	100		86.836.400
	Administral Umum	Sukadana	Terlaksananya administrasi Umum Dinas	100%		9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sukadana	Jumlah komponen instalasi listrik	8		4.112.300
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sukadana	Jumlah surat masuk dan surat keluar (Lembar)	700 lbr	5.000.000	10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sukadana	Jumlah peralatan rumah tangga	11		11.359.700
11	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sukadana	Jumlah tagihan rekening listrik dan telepon (tagihan listrik)	24 tgh	50.000.000	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sukadana	Jumlah makan dan minuman rapat,tamu dan harian	12		18.258.000
12	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sukadana	Jumlah jasa administrasi keuangan (orang)	26 org	239.000.000	12	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Sukadana	Jumlah barang cetak dan penggandaan	28000		18.176.400
13	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sukadana	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (orang)	17 org	187.000.000	13	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi Konsultasi SKPD	Sukadana	Jumlah perjalanan dinas keluar dan dalam daerah	30		34.930.000
14	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sukadana	Jumlah Jasa Perbaikan alat kerja (unit)	17 unit	7.999.800		Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan dinas	100		527.682.400
15	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sukadana	Jumlah Alat Tulis Kantor	30 jenis	20.078.405,82	14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sukadana	Jumlah surat masuk dan surat keluar	200		3.000.000

16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sukadana	yang dibeli (jenis ATK)	10000 lbr	15.262.967	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sukadana	Jumlah tagihan rekening listrik dan telepon	12	58.126.400
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sukadana	Jumlah komponen instalasi listrik (jenis)	30 jenis	5.000.000	16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sukadana	Jumlah pengadaan Peralatan & Perlengkapan kantor	0	39.368.000
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sukadana	Jumlah Peralatan & Perlengkapan kantor (paket)	3 paket	12.000.000	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sukadana	Jumlah penyediaan jasa pelaksana layanan umum kantor	31	427.188.000
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sukadana	Jumlah peralatan rumah tangga (jenis)	20 jenis	18.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sukadana	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	215.506.135
20	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sukadana	Jumlah makan dan minuman rapat,tamu dan harian (Paket)	5 Paket	22.000.000	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sukadana	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	16	186.006.135
21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sukadana	Jumlah perjalanan dinas keluar dan dalam daerah (kali)	50 kali	70.000.000	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sukadana	Jumlah pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan kantor	3	9.500.000

22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sukadana	Jumlah Gedung arsip yang terpelihara (unit)	1 unit	20.000.000	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sukadana	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1	20.000.000
23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas atau operasional	Sukadana	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (unit)	15 unit	180.000.000						
							PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Sukadana	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan	0,32	511.660.700
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Sukadana	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan	75			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sukadana	Jumlah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota	9754	400.905.500
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sukadana	Jumlah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota	12000 Jdl		21	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sukadana	Jumlah pengembangan perpustakaan di daerah	1	132.183.400
24	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sukadana	Jumlah pendirian taman baca pada destinasi wisata	1 paket	39.099.455,88	22	Pembinaan Khusus Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota	Sukadana	Jumlah supervisi, pembinaan Perpustakaan khusus	10	39.698.900
25	Pembinaan Perpustakaan	Sukadana	Jumlah	75 kali		23	Pengembangan Layanan	Sukadana	Jumlah pengadaan	1	

	Khusus Kabupaten/kota	Tingkat	supervisi, pembi naan Perpustakaan khusus (kali)		40.000.000		Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		sarana daerah		106.437.900
26	Peningkatan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	Sukadana	Jumlah pengembangan kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	10 org	30.000.000	24	Pengembangan Bahan Pustaka	Sukadana	Jumlah Paket pengadaan bahan pustaka	1	
27	Pengembangan Perpustakaan Tingkat Kabupaten	Sukadana	Jumlah pengadaan sarana perpustakaan daerah	3 paket	50.000.000	25	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Sukadana	Jumlah Judul buku tambahan yang diolah	1	117.358.300
28	Pengembangan Pustaka	Sukadana	Jumlah Paket pengadaan bahan pustaka (paket)	1 paket	158.709.993		Pembudayaan Membaca Daerah Kabupaten/Kota	Sukadana	Jumlah Pengunjung perpustakaan	0,32	5.227.000
29	Pengelolaan dan Pengembangan Pustaka	Sukadana	Jumlah Judul buku tambahan yang diolah	1000 buku	20.879.997	26	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Sukadana	Jumlah layanan perpustakaan keiling dan keterampilan berliterasi	10	63.857.800
	Pembudayaan Membaca Tingkat Daerah	Sukadana	Jumlah Pengunjung perpustakaan	0,32		27	Pemilihan Duta Baca Daerah Kabupaten/Kota	Sukadana	Jumlah pelaksanaan lomba perpustades tingkat kabupaten dan jumlah pelaksanaan lomba	1	46.897.400

30	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus	Sukadana	Jumlah Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Keliling & sosialisasi ketrampilan berliterasi siswa	102 kali	153.880.000					bercerita tingkat kabupaten		
31	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Sukadana	Jumlah pelaksanaan lomba perpusdes tingkat kabupaten dan jumlah pelaksanaan lomba bercerita tingkat kabupaten	2 kali	75.879.938		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Sukadana	Terlaksananya Pelestarian naskah kuno	0,6		
							Pelestarian Naskah Kuno Milik Kabupaten/Kota	Sukadana	Jumlah naskah kuno yang dimiliki daerah	0,6	12.660.600	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Sukadana	Terlaksananya Pelestarian naskah kuno	100%		28	Pengembangan, dan Pengolahan Pengalihan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan	Sukadana	Jumlah naskah kuno yang akan dilestarikan	1	12.660.600	

	Pelestarian Naskah Milik Kabupaten/Kota	Sukadana	Jumlah naskah kuno yang dimiliki daerah	100%				Didayagunakan						
32	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Sukadana	Jumlah naskah kuno yang akan dilestarikan	40 arsip	24.529.613			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Sukadana	Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah bidang Kearsipan	12			200.149.950
								PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Sukadana	Retrival	30			126.002.800
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Sukadana	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Daerah	100%				Pengelolaan Dinamis Kabupaten/kota	Sukadana	Jumlah Arsip Dinamis daerah yang dikelola	100			27.900.500
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Sukadana	Jumlah Arsip Dinamis daerah yang dikelola	100%		29		Penciptaan dan Penggunaan Dinamis	Sukadana	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	10			15.398.500
33	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Sukadana	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	48 kali	30.876.401	30		Pemeliharaan Penyusutan Dinamis	Sukadana	Tindak pemeliharaan arsip funggasi, kuratif	2			12.502.000
34	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Sukadana	Tindak pemeliharaan arsip fungigasi, kuratif (Paket)	300 arsip	20.879.830			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Sukadana	Jumlah pengelolaan arsip statis daerah	100			22.486.300
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Sukadana	Jumlah pengelolaan arsip statis	100%		31		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Sukadana	Jumlah Penambahan Arsip Yang Tertata,terdata dan	300			22.486.300

	penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		dan penetapan izin yang tersedia		20.000.000									
--	---	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan

Tabel 2.5.

Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Prog./Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Vol.	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran jangka menengah Renstra Perpustnas RI adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional

1. Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca.
2. Pengembangan semua jenis perpustakaan.
3. Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan.
4. Peningkatan kualitas SDM perpustakaan.
5. Peningkatan keragaman koleksi yang lengkap dan mutakhir dan pelestarian koleksi warisan budaya bangsa Indonesia.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

1. Meningkatkan budaya gemar membaca, melalui:
 - a. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana pendukung proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi;
 - b. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; dan
 - c. Pembudayaan kegemaran membaca.
2. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas melalui:
 - a. Peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata yang mendukung pengembangan *techno park*, *science park* dan pelaksanaan revolusi mental;
 - b. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan termasuk naskah kuno;
 - c. Peningkatan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. Pengembangan kompetensi dan profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Perpustakaan Nasional RI

1. Peningkatan gemar membaca, dengan strategi:
 - a. Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.
 - b. Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan.

- c. Menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan melalui lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat.
 - d. Meningkatkan pola partisipasi industri penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.
2. Pengembangan koleksi Indonesiana yang lengkap dan mutakhir, dengan strategi:
- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi perpustakaan.
 - b. Meningkatkan pengelolaan koleksi naskah kuno.
 - c. Meningkatkan pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di Indonesia dan atau tentang Indonesia (Indonesiana).
 - d. Memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta dan adat, berbagai komunitas, dan perorangan (ahli) untuk membangun komunitas budaya lokal.
3. Peningkatan diversifikasi dan kualitas layanan perpustakaan berbasis TIK, dengan strategi:
- a. Memperkuat kapasitas kelembagaan perpustakaan dalam pengembangan layanan secara demokratis dan berkeadilan.
 - b. Meningkatkan pola interaksi perpustakaan, lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi, satuan pendidikan, masyarakat ilmiah dalam pengembangan repository dan diversifikasi layanan.
 - c. Meningkatkan akses bahan pustaka warisan dokumenter intelektual bangsa.
 - d. Membangun partisipasi aktif lembaga penelitian dan pengkajian, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan melalui pemberdayaan perpustakaan.
4. Pelestarian warisan dokumenter intelektual bangsa, dengan strategi:
- a. Memperkuat preservasi dan konservasi bahan pustaka warisan dokumenter intelektual bangsa.
 - b. Memperkuat preservasi warisan dokumenter dan budaya dalam format digital.
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, dengan strategi:
- a. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan perpustakaan.
 - b. Meningkatkan kerjasama dan jejaring antar perpustakaan baik nasional maupun internasional.
 - c. Membangun *resource sharing* antar perpustakaan di Indonesia.
6. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dengan strategi:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pustakawan.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sertifikasi kompetensi pustakawan.
 - c. Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, dan pelatihan kepustakawanan.
7. Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan Nasional yang modern
- a. Pengembangan perangkat lunak (*software*) aplikasi otomasi perpustakaan INLIS
 - b. Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional
 - c. Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional
 - d. Preservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno
 - e. Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perpustakaan RI tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Perpustakaan RI

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perpustakaan RI	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	SDM masyarakat	Telah terbentuk beberapa forum dan komunitas literasi	Forum dan komunitas literasi tidak didukung oleh anggaran/belum di fasilitasi anggaran oleh Pemerintah Kab. LamTim
2.	SDM pengelola perpustakaan	Telah ada beberapa pengelola perpustakaan di setiap perpustakaan sekolah dan desa	-Pengelola perpustakaan belum mempunyai kualifikasi pendidikan keperpustakaan -Perpustakaan sekolah dan desa belum ada pustakawan
3.	SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Adanya perda dan perbub yang mengatur tentang manajemen SDM di Perpustakaan	SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masih kurang dari sisi kuantitas dan kualitas

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dispusip Tahun 2025

Tujuan Renja Dispusip Kabupaten Lampung Timur 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kecerdasan masyarakat;
2. Meningkatkan tata kelola sesuai standar baku kearsipan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan perpustakaan dan arsip secara permanen;
4. Memudahkan akses layanan perpustakaan dan kearsipan;
5. Mengembangkan kelembagaan dan SDM perpustakaan dan kearsipan.

Sasaran Renja Dispusip tahun 2025 untuk Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan adalah :

1. Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan;
2. Memenuhi koleksi bahan perpustakaan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan perpustakaan;
4. Meningkatnya preservasi koleksi bahan perpustakaan dan;
5. Meningkatnya pemanfaatan bahan perpustakaan;
6. Meningkatnya layanan perpustakaan;
7. Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM perpustakaan;
8. Meningkatnya kerjasama perpustakaan.

Sedangkan Sasaran Program Pengembangan Kearsipan sebagai berikut ;

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip setiap pencipta arsip;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyimpanan arsip berdasarkan standar baku kearsipan;
3. Meningkatnya preservasi arsip;
4. Meningkatnya pemanfaatan arsip;
5. Meningkatnya layanan kearsipan;
6. Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM kearsipan;
7. Meningkatnya kerjasama kearsipan.

3.3 Program dan Kegiatan / Subkegiatan Dispusip Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

Tabel 2.8.

Program dan Kegiatan Sub Kegiatan Dispusip Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.320.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000
		Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.978.222.991
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400.000.000

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92.880.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.800.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.368.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000

2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	75.000.000
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000
			Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	40.000.000
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	50.000.000
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten	50.000.000
			Pengembangan Bahan Pustaka	50.000.000
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	25.000.000
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus	75.000.000
			Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	50.000.000
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	40.000.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	20.000.000
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	35.000.000
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	200.000.000
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	40.000.000
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan informasi, Akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/kota melalui JIKN	60.000.000
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan lembaga kearsipan daerah Kab/kota	40.000.000
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	40.000.000
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000

		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	30.000.000
6	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/kota	Penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup	25.000.000
			penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	25.000.000
	TOTAL	6 PROGRAM 16 KEGIATAN 46 Sub Kegiatan		7.694.590.991

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dispusip Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dari Renstra Dispusip Kabupaten Lampung Timur dan semestinya dapat dijadikan pedoman bagi setiap unit kerja di Dispusip Kabupaten Lampung Timur dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan selama 1 (satu) tahun.

Oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi serta langkah-langkah nyata dari seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dispusip Kabupaten Lampung Timur dalam rangka merealisasikan rencana-rencana yang sudah tertuang dalam bentuk dokumen Renja tersebut agar dapat dilaksanakan secara optimal.

Dengan adanya perencanaan kinerja yang baik, tentu akan meningkatkan motivasi kerja seluruh pegawai, dan dapat mendorong terjadinya suatu peningkatan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Lampung Timur



MOHAMMAD RIDWAN, SH, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19800312 200212 1 010

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						5.355.000.000,00							6.001.528.904,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.355.000.000,00							6.001.528.904,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5.173.114.275,00							5.796.528.904,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %			100 %	4.860.671.775,00						100 %	5.408.413.904,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	-			100 % 2 dok	7.847.514,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	DINAS	-	7.847.514,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.847.514,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Ket/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	DINAS		7.847.514,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	3.906.166.571,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-	-	4.090.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	3.824.718.571,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penguatan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-		4.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			-				-	64.730.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penguatan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	18.720.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penguatan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum perangkat daerah	-			100 %	144.285.300,00			-	-	-	-	265.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.577.085,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	45.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	9.122.515,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	21.808.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	18.161.700,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	45.620.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			-				-	20.000.000,00	-	-	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan perangkat daerah	-			100 %	539.556.640,00			-	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-	-	584.756.640,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	51.334.880,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-		52.334.880,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	488.221.750,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-		532.421.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	240.809.750,00			-	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-	-	310.809.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	200.809.750,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-		240.809.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	15.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	12 indeks			12 Indeks	292.442.596,00						12 indeks	336.115.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengetahuan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan perpustakaan	-			78 indeks	132.230.000,00			Mempertukar Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	masyarakat lampung timur	-	98.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				1 Layanan	92.230.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	masyarakat lampung timur		58.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				15 Perpustakaan	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	masyarakat lampung timur		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				150 Eksemplar	20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	masyarakat lampung timur		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	-			78 Indeks	160.212.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	masyarakat lampung timur	-	240.115.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				2 Orang	89.902.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	masyarakat lampung timur		89.902.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				4 Perpustakaan	50.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	masyarakat lampung timur		89.902.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegiatan Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				10 Lokasi	20.310.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	masyarakat lampung timur		60.310.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	50 %			50 %	20.000.000,00						50 %	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODIK RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA DPO TAHUN 2023	PRAKTIK CAPAIAN TAHUN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PROJEKSI MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENUNGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.23.03.2.01		Pelayanan Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten Kota	Pelayanan Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten Kota	-	-	-	4 naskah	20.000.000,00				Memperkuat Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Mengembangkan Layanan Publik Berbasis Digital dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital & Merata	penilik naskah kuno	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03.2.01.0003		Pengelolaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pencatatan Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pencatatan naskah kuno	4 Orang				20.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Mengembangkan Layanan Publik Berbasis Digital dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital & Merata	penilik naskah kuno		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						181.885.725,00							205.000.000,00	
1	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100 % 75 % 500 Orang			100 % 75 % 500 Orang	181.885.725,00						100 % 75 % 500 Orang	205.000.000,00	
			Jumlah arsip yang dikelola secara baku													
			Jumlah arsip yang dikelola secara baku													
			Jumlah arsip yang dikelola secara baku													
2.24.02.2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Arsip Dinamis daerah yang dikelola	-	-	-	100 %	58.885.725,00				Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Mengembangkan Layanan Publik Berbasis Digital & Merata	-	-	70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.0002		Penelitian dan Penyuluhan Arsip Dinamis	Penelitian dan Penyuluhan Arsip Dinamis													

NO	KODE	URISAN / BIDANG URISAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANALISIS PERIODE RESTRANS OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRANS TAHUN 2023	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET TAHUN OPD 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN KAJI BENJANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	0	25 000 000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	13	15	16	17
			Jumlah Nelayan Dulu yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				300 Nelayan					Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kualitas Pem erintahan dan Layanan Publik Berkeadilan & Merata		35 000 000,00	DINAS PERHUTAN DAN KEHUTANAN
2.24.02.2.01.0003		Pengembangan Anasir Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota													
			0				0 0	32 885 725,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kualitas Pem erintahan dan Layanan Publik Berkeadilan & Merata	-	30 000 000,00	DINAS PERHUTAN DAN KEHUTANAN
2.24.02.2.02		Pengelolaan Anasir Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan anasir statis daerah	-			100 %	48 000 000,00			-	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kualitas Pem erintahan dan Layanan Publik Berkeadilan & Merata	-	48 000 000,00	DINAS PERHUTAN DAN KEHUTANAN
2.24.02.2.03.0004		Akuisisi, Pengelolaan, Pemenuhan dan Anasir Anasir Statis													
			Amount Anasir Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengelolaan, Pemenuhan dan Anasir Anasir Statis				600 Anasir	48 000 000,00	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kualitas Pem erintahan dan Layanan Publik Berkeadilan & Merata	-	48 000 000,00	DINAS PERHUTAN DAN KEHUTANAN
2.24.02.2.03		Pengelolaan Sempul Jaringan Informasi Kearsifan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	75 000 000,00			-	Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kualitas Pem erintahan dan Layanan Publik Berkeadilan & Merata	-	80 000 000,00	DINAS PERHUTAN DAN KEHUTANAN
2.24.02.2.03.0001		Penyediaan informasi, Anasir dan Layanan Kearsifan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui JKN													

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-SKPD) TAHUN 2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumusan rancangan Renja SKPD dan tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Kepala Bappeda mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD berdasarkan rancangan Renja SKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan, maka dibutuhkan beberapa sarana dan prasarana pendukung terhadap pelaksanaan tugas Bappeda Kabupaten Lampung Timur diantaranya meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 ini menyusun Buku Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berguna untuk mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam perumusan Renja SKPD adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Rencana Kerja ini adalah merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur selama tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya renja, struktur organisasi Bappeda Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD.
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan program dan kegiatan yang direncanakan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan.

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Lampung Timur Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 secara keseluruhan adalah Rp. 12.389.043.677,00 dan terealisasi sebesar 90,70 % atau Rp. 11.236.456.210,00 Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran 2024 tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur, secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 dapat memenuhi kriteria dengan baik.

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.480.505.677,-; dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 8.053.334.048,- (94,96%).

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 117.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 102.760.800,- (87,83%).

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 69.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 60.910.800,- (88,28%)
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Outcome: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 48.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 41.850.000,- (87,19%)
Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Outcome: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.591.261.577,-, terealisasi sebesar Rp. 6.411.133.948,- (97,27%).

Sub Kegiatan :

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.158.052.652,-, terealisasi sebesar Rp. 5.987.966.948,- (97,24%)

Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

Outcome: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.

- 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp. 247.708.925,-, terealisasi sebesar Rp. 240.165.000,- (96,95%)

Output: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Outcome: Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 115.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 113.945.000,- (99,08%)

Output: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Outcome: Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

- 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 20.025.000,- (97,68%)

Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Outcome: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 29.122.000,- (97,07%)

Output: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Outcome: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 19.910.000,- (99,55%)
Output: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
Outcome: Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp 40.000.000,-, terealisasi sebesar Rp.35.190.000,- (87,98%).

Sub Kegiatan :

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 35.190.000,- (87,98%).
Output: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
Outcome: Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 558.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 511.177.240,- (91,53%).

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 47.590.000,- (95,18%).
Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 49.915.000,- (99,83%).
Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 45.565.000,- (91,13%).
Output: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 22.430.000,- (89,72%).
Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
Outcome: Tersedianya Bahan Logistik Kantor.

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 77.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 70.320.000,- (90,74%).

Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.

Outcome: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 270.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 239.357.240,- (88,65%).

Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Outcome: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 36.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 36.000.000,- (100%)

Output: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Outcome: Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 223.244.100,-, terealisasi sebesar Rp. 196.470.000,- (88,01%).

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 223.244.100,-, terealisasi sebesar Rp. 196.470.000,- (88,01%).

Output: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan.

Outcome: Tersedianya Aset Tetap Lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 369.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 356.840.245,- (96,70%).

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 56.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 49.940.125,- (89,18%).

Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

Outcome: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp. 313.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 306.900.120,- (98,05%).

Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

Outcome: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 478.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 439.761.815,- (91,90%).

Sub Kegiatan :

- 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 338.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 335.139.815,- (99,01%).

Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

Outcome: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- 2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 49.170.000,- (81,95%).

Output: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara.

Outcome: Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

- 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 55.452.000,- (69,32%).

Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Outcome: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.187.130.000,-;dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 933.492.200,- (78,63%).

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 656.547.700,-, terealisasi sebesar Rp. 553.826.300,- (84,35%)

Sub Kegiatan :

- 1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 170.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 127493.900,- (75,00%)

Output: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik).

Outcome: Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD

2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp. 39.300.000,-, terealisasi sebesar Rp. 34.242.900,- (87,13%)
Output: Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah.
Outcome: Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain.
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 36.835.400,- (73,67%)
Output: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik.
Outcome: Terlaksananya Konsultasi Publik.
4. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 59.630.000,-, terealisasi sebesar Rp. 59.212.700,- (99,30%)
Output: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
Outcome : Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 95.811.000,-, terealisasi sebesar Rp. 80.466.100,- (83,98%)
Output : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota.
Outcome: Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota.
6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 91.806.700,-, terealisasi sebesar Rp. 87.694.900,- (95,52%)
Output : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan.
Outcome: Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan.
7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 127.880.400,- (85,25%)
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD).
Outcome: Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dan sebesar Rp. 126.038.000,-, terealisasi sebesar Rp 69.045.700,- (54,78%).

Sub Kegiatan :

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 52.513.300,-, terealisasi sebesar Rp. 37.410.800,- (71,24%)

Output: Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah).

Outcome: Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.860.500,-, terealisasi sebesar Rp. 24.347.600,- (58,16%)

Output: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi.

Outcome: Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 31.664.200,-, terealisasi sebesar Rp. 7.287.300,- (23,01%)

Output: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan.

Outcome: Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ,dengan alokasi dana sebesar Rp. 225.974.800,-, terealisasi sebesar Rp. 145.948.800,- (64,59%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.652.000,-, terealisasi sebesar Rp. 47.271.400,- (66,91%).

Output : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Outcome: Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.

2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 135.322.800,-, terealisasi sebesar Rp. 98.677.400,- (72,92%).

Output : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Outcome: Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 178.569.500,-, terealisasi sebesar Rp. 164.671.400,- (92,22%).

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp. 148.569.600,-, terealisasi sebesar Rp. 147.499.500,- (99,28%).

Output : Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola.

Outcome: Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.999.900,-, terealisasi sebesar Rp. 17.171.900,- (57,24%).

Output : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Outcome: Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

c) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.131.387.500,-; dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 1.712.249.922,- (80,33%).

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 798.643.100,-, terealisasi sebesar Rp. 595.514.900,- (74,57%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 164.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 113.046.200,- (68,93%).

Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Outcome: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 29.763.300,- (72,59%).

Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.

Outcome: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 70.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 57.863.200,- (82,66%).

Output : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 121.643.100,-, terealisasi sebesar Rp. 85.490.500,- (70,28%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan.

5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 160.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 98.109.600,- (61,32%).

Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

Outcome: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 23.973.500,- (64,79%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia.

Outcome: erasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 110.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 102.438.400,- (93,13%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia.

Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan alokasi dana sebesar Rp. 95.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 84.830.200,- (89,29%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan alokasi dana sebesar Rp. 573,531,600,-, terealisasi sebesar Rp. 464.095.200,- (80,92%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 56.931.600,-, terealisasi sebesar Rp. 38.513.600,- (74,767,650%).

Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

Outcome: Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 18.852.900,- (99,23%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian.
Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, dengan alokasi dana sebesar Rp. 89.900.000,-, terealisasi sebesar Rp. 69.077.000,- (76,84%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian.
Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dengan alokasi dana sebesar Rp. 96.700.000,-, terealisasi sebesar Rp. 77.179.100,- (79,81%).
Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian.
Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian.
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 81.750.700,- (90,83%).
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
Outcome: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 20.347.400,- (99,26%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA.
Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dengan alokasi dana sebesar Rp. 99.500.000,-, terealisasi sebesar Rp. 80.601.500,- (81,01%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA.

Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA), dengan alokasi dana sebesar Rp. 101.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 77.773.000,- (77,00%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 759,212,800,-, terealisasi sebesar Rp. 652.639.822,- (85,96%).

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 112.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 104.693.410,- (93,48%).

Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

Outcome: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD).

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 62.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 54.020.000,- (87,13%).

Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur.

Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 61.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 51.465.000,- (84,37%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur.
Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dengan alokasi dana sebesar Rp. 76.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 51.530.000,- (67,80%).
Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur.
Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur.
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 280.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 266.142.412,- (95,05%).
Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
Outcome: Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 27.212.800,-, terealisasi sebesar Rp. 5.890.000,- (21,64%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan.
Outcome: Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 41.794.000,- (69,66%).
Output: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan.
Outcome: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 81.000.000,-, terealisasi sebesar Rp. 77.105.000,- (95,19%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan.

Outcome: Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan.

d) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 590.020.500,-; dan realisasi fisik keuangan sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar Rp. 537.380.040,- (91,08%).

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 289.377.800,-, terealisasi sebesar Rp. 244.059.300,- (84,34%).

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan alokasi dana sebesar Rp. 114.089.800,-, terealisasi sebesar Rp. 93.849.800,- (82,26%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

Outcome: Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.188.000,-, terealisasi sebesar Rp. 19.008.000,- (99,06%).

Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

Outcome: Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.300.000,-, terealisasi sebesar Rp. 30.477.800,- (81,71%).

Output: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi.

Outcome: Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi.

4. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 118.800.000,-, terealisasi sebesar Rp. 100.723.700,- (84,78%).

Output: Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik.

Outcome: Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik.

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan alokasi dana Rp. 139.050.000,-, terealisasi sebesar Rp. 133.536.740,- (96,04%)

Sub Kegiatan :

1. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 139.050.000,-, terealisasi sebesar Rp. 133.536.740,- (96,04%).

Output: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.

Outcome: Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.

3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan alokasi dana Rp. 161.592.700,-, terealisasi sebesar Rp. 159.784.000,- (98,88%)

Sub Kegiatan :

1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 161.592.700,-, terealisasi sebesar Rp. 159.784.000,- (98,88%).

Output: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

Outcome: Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II

Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 secara keseluruhan adalah Rp. 12.171.219.470,00 dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar 52,02% atau Rp. 5.114.023.969,00. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 tersebut sampai dengan triwulan II masih rendah namun diperkirakan akan sesuai target di akhir tahun.

2.1.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bappeda Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026. Untuk meningkatkan akuntabilitasnya, Bappeda Kabupaten Lampung Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Bappeda Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 secara rata-rata mendekati target, yaitu sebesar 90 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah dan provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan

daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut diatas Bappeda Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur, terus mengalami peningkatan kualitas. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang ditandai dengan peningkatan peran serta aktif berbagai unsur terkait pembangunan daerah dalam Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan Pemda Lampung Timur;
2. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya kualitas pendampingan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan oleh BAPPEDA dan SKPD Teknis terkait;
5. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan serta penyediaan data dalam rangka mendukung penyusunan dokumen perencanaan;
6. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun oleh dinas teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
4. Belum adanya sistem informasi perencanaan manajemen perencanaan yang layak;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
6. Kebijakan pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemda Lam Tim;
7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *bottom up*;
10. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
11. Belum optimalnya kerjasama pembangunan antara pemerintah dan dunia usaha/lembaga;
12. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
13. Program dan kegiatan yang diusulkan dan akan dilaksanakan oleh SKPD belum berjalan optimal.

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD

Badan perencanaan pembangunan daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung timur. Bappeda Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Bappeda Kabupaten Lampung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta;
- f. pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka Bappeda Kabupaten Lampung Timur menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun ke depan, sebagai berikut.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur secara umum adalah terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel untuk mencapai target indikator kinerja daerah, yang akan menjadi acuan bagi organisasi Bappeda Kabupaten Lampung Timur dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan secara :

Tujuan

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencanaan pembangunan, serta kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana penunjang kinerja perencanaan.
2. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
3. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas koordinasi perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah, serta fasilitasi pencarian sumber-sumber pendanaan.
4. Mengoptimalkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di daerah
5. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Sasaran

1. Memberdayakan SDM perencanaan pembangunan dengan kemampuan teknis dan disiplin pegawai disertai tersedianya sarana dan prasarana kinerja perencanaan yang baik.
2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah, RKPD, Rencana Tata Ruang di Daerah) yang berkualitas, terpadu dan tepat waktu.
3. Terlaksananya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan baik yang dibiayai dari APBN, dan APBD (Provinsi, kabupaten).
4. Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi lintas sektor serta lintas wilayah terhadap pelaksanaan pembangunan daerah

5. Terbangunnya kerjasama pembangunan dengan Daerah lain yang berkelanjutan dan Terfasilitasinya pencarian sumber- sumber pendanaan pembangunan.

Selanjutnya, pada Tabel di bawah ini ditampilkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bappeda guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pro rakyat sebagaimana tujuan pada Misi ke-6 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 81 tahun 2021 Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah KAbupaten Lampung timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
4. Bidang Sosial Budaya
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
7. Bidang Pendanaan dan Pengendalian
8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung timur Tahun 2024. Sejalan dengan kebijakan Provinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro ekonomi dan makro sosial , yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Bappeda dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Bappeda tahun 2024 telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal RKPD (Ranwal RKPD) tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Didalam RPJMD 2021-2026 arah kebijakan pembangunan nasional merupakan kebijakan utama yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang telah teridentifikasi dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan maka diperlukan perencanaan pembangunan, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan RPJMN tahap ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan merupakan kelanjutan dari RPJMN periode sebelumnya (RPJMN 2015-2019). Berdasarkan hasil evaluasi, RPJMN 2015-2019 telah menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan, namun belum seluruh bagian yang ada dalam RPJMN tersebut dapat dioperasionalkan dengan baik. Hal ini disebabkan antara lain : (1) Penyusunan struktur kebijakan yang ada dalam RPJMN 2015-2019 belum semuanya menggunakan kerangka kerja logis (*logical framework*) yang sesuai, sehingga rumusan sasaran dan arah kebijakannya menjadi tidak jelas; (2) Indikator yang digunakan masih belum dirumuskan dengan baik dan terukur; (3) Terdapat perbedaan penggunaan istilah dan sistematika dalam Buku I, II dan III RPJMN sehingga sulit menemukan benang merah antara ketiga buku tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2021-2026, maka program Bappeda Kabupaten Lampung Timur tidak lepas dari visi, misi dan program Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Lampung Timur. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, yaitu :

“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Kehidupan Masyarakat yang Religius

Kehidupan masyarakat yang memiliki tata hubungan kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai agama (religius), kearifan lokal dan hukum, sehingga dapat tercipta sinergitas kerja yang optimal dalam rangka membangun Kabupaten Lampung Timur. Hubungan erat dan mendalam antara manusia dengan Tuhan dalam segala kiprah dan karyanya dalam kehidupan, artinya masyarakat Lampung Timur selalu mengaitkan segala perbuatan, kiprah, karya dan hasil baktinya dalam konteks hubungan khalik (pencipta hidup) dan makhluk (penikmat hidup) yang dilandasi rasa ikhlas, tulus dan syukur. Tata hubungan masyarakat tersebut mencakup hubungan antar dan inter agama, antar suku, antar budaya, senantiasa memegang teguh kebhinekaan dalam suasana yang agamis. Kondisi masyarakat Lampung Timur yang kental sekali dengan nilai-nilai agama akan menjadi modal dasar dalam membangun Lampung Timur kedepan.

Kehidupan Masyarakat yang Berdaya saing

Kehidupan masyarakat yang memiliki kekuatan potensi yang ada untuk dapat bersaing dan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Aset utama daerah salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya masyarakatnya. Satu juta lebih penduduk Kabupaten Lampung Timur kedepan diharapkan unggul, berkualitas, mampu

berkompetisi, bisa berinovasi dan juga kreatif dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan nilai tambah (added value) yang tinggi, guna meningkatkan kualitas hidupnya.

Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan

Kehidupan masyarakat yang berkeadilan mengandung makna suatu keadaan tatanan dasar kehidupan masyarakat Lampung Timur yang dapat terlayani secara adil dan merata diberbagai bidang kehidupan, dengan cukupnya ketersediaan fasilitas dan pelayanan dasar masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman tenteram dan damai. Tatanan dasar tersebut mencakup infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, iklim usaha yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional, jujur, pedulim dan merakyat.

Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera

Kehidupan masyarakat yang sejahtera mengandung makna kondisi masyarakat yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya sehingga dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, sentosa dan makmur lahir batin. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan, sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang, pelayanan keamanan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial. Disamping itu pembangunan infrastruktur diperlukan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bappeda adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme apatur Bappeda dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan. Berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025, pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk belanja pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, dengan ruang lingkup kegiatannya.

Matrik Rencana Kerja

Program dan Kegiatan Pembangunan yang Akan Dilaksanakan Oleh Bappeda Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01				PERENCANAAN				13.675.150.910,00				15.951.356.502,60
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Lampung Timur	77	10.192.985.502,00			78	10.573.089.315,00
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Lampung Timur	86	16.201.121,00			88	16.201.121,00
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Timur	1 Dokumen	7.847.514,00	APBD		3 Dokumen	7.847.514,00
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lampung Timur	1 Dokumen	8.353.607,00	APBD		4 Dokumen	8.353.607,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lampung Timur	86	8.184.018.560,00			88	9.264.888.194,00
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lampung Timur	45 Org/ Bulan	7.869.830.366,00	APBD		47 Org/ Bulan	8.800.000.000,00
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Timur	1 Dokumen	180.000.000,00	APBD		1 Dokumen	280.400.000,00
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lampung Timur	2 Dokumen	94.000.000,00	APBD		2 Dokumen	130.000.000,00
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lampung Timur	1 Laporan	9.488.194,00	APBD		1 Laporan	9.488.194,00

[illegible]

5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Timur	86	378.000.000,00			88	378.000.000,00
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lampung Timur	4 Laporan	65.000.000,00	APBD		4 Laporan	65.000.000,00
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lampung Timur	3 Laporan	313.000.000,00	APBD		3 Laporan	313.000.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lampung Timur	86	399.000.000,00			88	432.000.000,00
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Lampung Timur	22 Unit	284.000.000,00	APBD		22 Unit	347.000.000,00
5	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	Lampung Timur	45 Unit	45.000.000,00	APBD		45 Unit	45.000.000,00
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lampung Timur	2 Unit	70.000.000,00	APBD			40.000.000,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator kinerja utama pembangunan daerah yang tercapai (%))	Lampung Timur	73%	1.316.455.136,00			75%	1.211.731.444,00
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun (Dok)	Lampung Timur	2 Dokumen	906.432.218,00			2 Dokumen	997.075.439,80
5	01	02	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	Lampung Timur	1 Dokumen	105.373.052,00	APBD		1 Dokumen	115.910.357,20
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Lampung Timur	1 Dokumen	195.269.763,00	APBD		1 Dokumen	214.796.739,30
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Lampung Timur	1 Berita Acara	56.640.027,00	APBD		1 Berita Acara	62.304.029,70
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Lampung Timur	2 Berita Acara	64.652.411,00	APBD		2 Berita Acara	71.117.652,10
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Lampung Timur	2 Berita Acara	208.332.521,00	APBD		2 Berita Acara	229.165.773,10
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Lampung Timur	24 Usulan	93.941.104,00	APBD		24 Usulan	103.335.214,40

[illegible]

5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya, perekonomian dan praswil	Lampung Timur	70%	2.165.710.272,00			80%	3.469.721.200,00
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Indikator Program Perngkat Daerah yang tercapai bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lampung Timur	80-90%	737.455.136,00	APBD		85-90%	1.422.012.800,00
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	6 Dokumen	108.813.792,00	APBD		6 Dokumen	162.219.000,00
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung Timur	6 Perangkat Daerah	41.869.900,00	APBD		6 Perangkat Daerah	65.600.000,00
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lampung Timur	2 Laporan	59.496.000,00	APBD		2 Laporan	138.328.000,00
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Lampung Timur	1 Laporan	113.309.763,00	APBD		1 Laporan	460.455.000,00
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	9 Dokumen	159.439.889,00	APBD		9 Dokumen	155.173.000,00
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Timur	9 Perangkat Daerah	26.917.792,00	APBD		9 Perangkat Daerah	66.758.800,00
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Timur	9 Perangkat Daerah	67.558.000,00	APBD		9 Perangkat Daerah	172.379.000,00
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Lampung Timur	1 Laporan	160.050.000,00	APBD		1 Laporan	201.100.000,00

5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai bidang perekonomian dan SDA (%)	Lampung Timur	80-90%	552.000.000,00	APBD		85-90%	920.000.000,00
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	4 dokumen	72.324.500,00	APBD		4 dokumen	200.000.000,00
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	15.000.000,00	APBD		4 Perangkat Daerah	35.000.000,00
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	50.000.000,00	APBD		4 Perangkat Daerah	120.000.000,00
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Lampung Timur	4 laporan	95.348.500,00	APBD		4 laporan	130.000.000,00
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	2 dokumen	100.000.000,00	APBD		2 dokumen	150.000.000,00
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung Timur	2 Perangkat Daerah	15.000.000,00	APBD		2 Perangkat Daerah	35.000.000,00
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lampung Timur	2 Perangkat Daerah	50.000.000,00	APBD		2 Perangkat Daerah	120.000.000,00
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Lampung Timur	2 laporan	154.327.000,00	APBD		2 laporan	130.000.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Indikator Capaian Program Perangkat Daerah yang Tercapai Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Lampung Timur	80%	876.255.136,00			85%	1.127.708.400,00

5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	4 Dokumen	136.620.000	APBD		4 Dokumen	198.000.000,00
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	89.280.000	APBD		4 Perangkat Daerah	102.000.000,00
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	49.655.136	APBD		4 Perangkat Daerah	102.000.000,00
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infratruktur	Lampung Timur	4 Laporan	88.400.000	APBD		4 Laporan	108.000.000,00
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Lampung Timur	4 Dokumen	384.300.000	APBD		4 Dokumen	329.708.400,00
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	67.500.000	APBD		4 Perangkat Daerah	84.000.000,00
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lampung Timur	4 Perangkat Daerah	14.500.000	APBD		4 Perangkat Daerah	96.000.000,00
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	Lampung Timur	4 Laporan	46.000.000	APBD		4 Laporan	108.000.000,00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				511.172.373,00				696.814.543,60
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	CAKUPAN KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Lampung timur	70%	511.172.373,00	APBD		80%	696.814.543,60
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelengaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase ketersediaan Peneltian dan Pengembangan Penyusunan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan serta Data/Informasi Pembangunan	Lampung timur	70%	274.387.697,00	APBD		80%	540.000.000,00

5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan fasilitasi , Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Lampung timur	1 Laporan	52.495.197	APBD		1 laporan	150.000.000
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	lampung timur	1 laporan	31.300.000	APBD		1 laporan	175.000.000
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi	lampung timur	1 laporan	63.150.000	APBD		1 laporan	65.000.000
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan Baik	Lampung timur	1 Laporan	127.442.500	APBD		1 laporan	150.000.000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	lampung timur	70%	94.226.000,00	APBD		80%	175.000.000,00
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	lampung timur	1 dokumen	94.226.000	APBD		1 dokumen	175.000.000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase ketersediaan data, informasi inovasi serta Teknologi Hasil Kelitbangan	lampung timur	70%	142.558.676,00	APBD		80%	156.814.543,60
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	lampung timur	1 dokumen	142.558.676	APBD		1 dokumen	156.814.544
JUMLAH									14.186.323.283,00				16.648.171.046,20



BAB IV PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Semoga Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Sukadana, 26 Juli 2024

Kepala Bappeda
Kabupaten Lampung Timur



Ir. Agusrina Syaka, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680413200003 1 005

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KAB. LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH							9.310.856.139,00	9.805.319.493,00	8.365.487.921,00	-945.368.218,00						10.891.780.758,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.310.856.139,00	9.805.319.493,00	8.365.487.921,00	-945.368.218,00							10.891.780.758,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							8.468.165.691,00	8.893.795.045,00	8.323.044.070,00	-145.121.621,00							9.949.090.310,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kualitas pelayanan intern OPD				100 %	100 %	6.873.083.765,00	7.225.300.569,00	6.714.174.199,00	235.924.614,00							7.109.008.379,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan				5 laporan	5 laporan	47.849.824,00	47.849.824,00	46.769.824,00	-1.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		53.849.824,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.847.514,00	7.847.514,00	7.847.514,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			8.847.514,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.379.027,00	8.379.027,00	8.379.027,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			9.379.027,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.106.855,00	8.106.855,00	8.106.855,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			9.106.855,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.975.342,00	6.975.342,00	5.895.342,00	-1.080.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			7.975.342,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	8.187.479,00	8.187.479,00	8.187.479,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			9.187.479,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	8.353.607,00	8.353.607,00	8.353.607,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			9.353.607,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan				1 laporan	1 laporan	5.273.520.103,00	5.523.719.457,00	5.223.684.976,00	-49.835.127,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		5.345.520.103,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/b ulan	37 Orang/b ulan	4.878.889.392,00	5.128.346.246,00	4.938.000.876,00	59.111.484,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberaritasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			4.928.889.392,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	156.561.585,00	163.184.085,00	50.684.085,00	-105.877.500,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			166.561.585,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	215.707.308,00	209.827.308,00	212.638.197,00	-3.069.111,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			225.707.308,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.488.194,00	9.488.194,00	9.488.194,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			10.488.194,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12.873.624,00	12.873.624,00	12.873.624,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			13.873.624,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan				3 laporan	3 laporan	22.761.626,00	22.761.626,00	22.761.626,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		24.761.626,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.929.842,00	10.929.842,00	10.929.842,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			11.929.842,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.831.784,00	11.831.784,00	11.831.784,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			12.831.784,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan				4 laporan	4 laporan	598.600.807,00	669.792.484,00	493.324.298,59	-105.276.508,41			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		638.525.421,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.393.368,00	16.393.368,00	16.393.368,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			17.393.368,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	154.148.819,00	287.388.350,00	107.072.069,00	-47.076.750,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			164.686.583,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	43.309.528,00	43.309.528,00	20.232.326,59	-23.077.201,41	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			44.309.528,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.311.538,00	6.105.600,00	6.105.600,00	-11.205.938,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			18.311.538,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32.037.125,00	35.414.359,00	33.467.656,00	1.430.531,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			33.037.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	0 Dokumen	27.720.000,00	0,00	0,00	-27.720.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.963.150,00	274.464.000,00	303.336.000,00	2.372.850,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			353.070.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	0 0	6.717.279,00	6.717.279,00	6.717.279,00	0,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			7.717.279,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit				1 unit	1 unit	130.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan				2 laporan	2 laporan	455.397.905,00	455.125.678,00	437.123.074,41	-18.274.830,59			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		465.397.905,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	115.245.440,00	115.070.413,00	97.067.809,00	-18.177.631,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			120.245.440,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	340.152.465,00	340.055.265,00	340.055.265,41	-97.199,59	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			345.152.465,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	344.953.500,00	366.051.500,00	350.510.400,00	5.556.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		440.953.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	278.490.000,00	266.116.600,00	258.716.600,00	-19.773.400,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			288.490.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	42.463.500,00	49.934.900,00	41.931.800,00	-531.700,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			52.463.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	50.000.000,00	49.862.000,00	25.862.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase disiplin ASN Persentase kinerja ASN Tingkat kualitas pengadaan ASN				88 90 98 % % %	88 90 98 % % %	1.595.081.926,00	1.668.494.476,00	1.608.869.871,00	1.245.000.005,00							2.840.081.931,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>cakupan jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian</i>				76 %	76 %	358.132.473,00	431.545.023,00	557.038.625,00	198.906.152,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		533.134.973,00	BADAN KEPEGAWAIAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	31.320.600,00	31.320.600,00	22.054.600,00	-9.266.000,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			41.320.600,00	BADAN KEPEGAWAIAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>				8 Dokumen	8 Dokumen	149.997.500,00	149.997.500,00	427.473.426,00	277.475.926,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			275.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>				550 Dokumen	550 Dokumen	59.778.147,00	59.778.147,00	38.206.177,00	-21.571.970,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			69.778.147,00	BADAN KEPEGAWAIAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	47.906.900,00	121.319.450,00	32.985.064,00	-14.921.836,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			57.906.900,00	BADAN KEPEGAWAIAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>				-	0 0	36.842.326,00	36.842.326,00	27.830.714,00	-9.011.612,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			46.842.326,00	BADAN KEPEGAWAIAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				12 Laporan	12 Laporan	32.287.000,00	32.287.000,00	8.488.644,00	-23.798.356,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			42.287.000,00	BADAN KEPEGAWAIAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Cakupan Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN</i>				78 %	78 %	799.974.158,00	799.974.158,00	792.995.412,00	-6.978.746,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		1.076.290.263,00	BADAN KEPEGAWAIAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>				135 Dokumen	135 Dokumen	61.345.225,00	61.345.225,00	22.614.769,00	-38.730.456,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			71.345.225,00	BADAN KEPEGAWAIAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>				1450 Dokumen	1450 Dokumen	94.560.533,00	94.560.533,00	35.421.143,00	-59.139.390,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			104.560.533,00	BADAN KEPEGAWAIAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>				5 Dokumen	1 Dokumen	644.068.400,00	644.068.400,00	734.959.500,00	90.891.100,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			900.384.505,00	BADAN KEPEGAWAIAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Cakupan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi</i>				-	81 %	271.460.929,00	271.460.929,00	154.722.059,00	-116.738.870,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		1.025.142.329,00	BADAN KEPEGAWAIAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	80 Orang	68.028.400,00	68.028.400,00	38.111.977,00	-29.916.423,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			768.028.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	72.113.929,00	72.113.929,00	27.493.782,00	-44.620.147,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			82.113.929,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				120 Orang	120 Orang	131.318.600,00	131.318.600,00	89.116.300,00	-42.202.300,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen				670 dokumen	670 dokumen	165.514.366,00	165.514.366,00	104.113.775,00	-61.400.591,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		205.514.366,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Dokumen	12 Dokumen	73.246.900,00	73.246.900,00	31.143.100,00	-42.103.800,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			83.246.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				350 Orang	350 Orang	46.173.852,00	46.173.852,00	28.786.453,00	-17.387.399,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			56.173.852,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				10 Laporan	10 Laporan	34.809.400,00	34.809.400,00	38.902.980,00	4.093.580,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			44.809.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				5 Dokumen	5 Dokumen	11.284.214,00	11.284.214,00	5.281.242,00	-6.002.972,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			21.284.214,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							842.690.448,00	911.524.448,00	42.443.851,00	-800.246.597,00							942.690.448,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-				-	-	842.690.448,00	911.524.448,00	42.443.851,00	100.000.000,00							942.690.448,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	325 dokumen	842.690.448,00	911.524.448,00	42.443.851,00	-800.246.597,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata	ASN KAB. LAMPUNG TIMUR		942.690.448,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				109 Laporan	1 Laporan	842.690.448,00	911.524.448,00	42.443.851,00	-800.246.597,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			942.690.448,00	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
		J U M L A H							9.310.856.139,00	9.805.319.493,00	8.365.487.921,00	-945.368.218,00						10.891.780.758,00		



BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

RENCANA KERJA 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang di amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana–rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pendapatan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Renja perubahan Badan Pendapatan Daerah disusun dengan memperhatikan target pencapaian indikator kinerja, dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam periode satu tahun yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja perubahan diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan tujuan, sasaran, dan program prioritas. Selain itu Renja perubahan juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini Perencanaan Strategis (Strategic Planning) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi. Perencanaan strategis dapat disebut sebagai metode yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali berkaitan dengan kepentingan organisasi. Juga merupakan suatu Metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang di timbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Renja perubahan memiliki beberapa fungsi antara lain :

- a. Mengukur kinerja pelayanan SKPD
- b. Menjadi pedoman untuk menyusun program dan kegiatan tahunan perubahan OPD
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan OPD
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II tahun berjalan

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perubahan

Maksud Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perubahan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan Pembangunan.
5. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur serta indikator kinerjanya yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun berjalan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Demikian juga halnya dengan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Bapenda yang tertuang dalam Renstra 2025-2029

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahunan (%)	6,71	10	10	11	15	17	18

2.2. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Target Rp. 280.046.453.121,- realisasi sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 123.675.783.193,44 atau sebesar 44,16 %

1. Pajak Daerah Target Rp. 152.870.000.000 terealisasi sampai dengan 30 Juni sebesar 64.300.720.850 atau sebesar 42,06 %

Pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak reklame target Rp. 1.400.000.000 terealisasi Rp. 875.655.259 atau sebesar 62,55 %
 2. Pajak air tanah target Rp. 1.000.000.000 terealisasi Rp. 589.041.614 atau sebesar 58,90 %
 3. Pajak mineral bukan logam dan batuan (batu belah) target Rp. 5.500.000.000 terealisasi Rp. 275.490.000 atau sebesar 5,01 %
 4. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) target Rp. 25.000.000.000 terealisasi Rp. 11.970.184.581 atau sebesar 47,88 %
 5. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) target Rp. 5.000.000.000 terealisasi Rp. 2.256.138.525 atau sebesar 45,12 %
 6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp. 49.970.000.000 terealisasi Rp. 22.459.255.381 atau sebesar 44,95 %
 7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 38.104.023.722 terealisasi Rp. 15.631.277.424 atau sebesar 41,02 %
 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 26.895.976.278 terealisasi Rp. 10.243.678.066 atau sebesar 38,09 %
2. Retribusi daerah target Rp. 110.201.453.121 terealisasi Rp. 41.418.039.562 atau 37,58 %

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan target Rp. 6.500.000.000 terealisasi Rp. 1.064.875.474,69 atau 16,38 %
4. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah target Rp. 10.475.000.000 terealisasi Rp. 16.892.147.306,75 atau 161,26 %
5. Pendapatan transfer target Rp. 2.133.409.155.221 terealisasi Rp. 919.789.444.841 atau 43,11 %

Adapun realisasi anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Belanja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasai		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.858.449.397	57	3.372.627.808	26,20
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.123.476.376	57	759.540.584	15,95
	Jumlah	20.981.925.773			

Kinerja program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 2 program, 9 kegiatan dan 57 sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 4.132.168.392 dari target sebesar Rp. 20.981.925.773 atau (22,65 %), sedangkan realisasi fisik sebesar 57%. Jauhnya perbedaan perkembangan realisasi fisik dan keuangan disebabkan administrasi keuangan yang belum diselesaikan dan pemberian UP yang belum memadai. Seluruh program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah telah mendukung sasaran kinerja pada indikator tujuan/sasaran pada Renstra perangkat daerah.

Berikut tabel Program dan kegiatan yang berkaitan dengan sasaran Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran Triwulan II

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
	Belanja Tidak Langsung	10.160.990.803	2.881.276.972	28,36	40	100,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.160.990.803	2.881.276.972	28,36	40	100,00
	Belanja Langsung	10.820.934.970,00	1.239.463.970,00	11,56		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.697.458.594	479.923.386	13,29		
5.02.01.2.01	I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.849.824	14.088.600	24,35		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514	5.633.971	71,79	1	50,00
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027	-	0,00	0	-
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.106.855	-	0,00	0	-
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.975.342	-	0,00	0	-
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	-	0,00	0	-
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.187.479	5.016.029	61,26	1	33,33

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.353.607	3.438.600	41,16	1	100,00
5.02.01.2.02	II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	465.761.329	148.107.769	31,80		
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	213.162.518	57.347.289	26,90	1	100,00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	181.898.373	58.865.343	32,36	1	100,00
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.503.119	6.276.715	40,49	1	100,00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194	7.647.975	80,61	0	-
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	26.919.070	8.682.982	32,26	0	-
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.790.055	4.742.273	34,39	0	-
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	4.545.192	90,90	0	-
5.02.01.2.03	III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.769.005	8.357.647	14,99		
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.500.000	-	0,00	0	-
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	#DIV/0! !	1	100,00
5.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	15.407.368	5.609.447	36,41	0	-
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.906.802	-	0,00	0	-
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.954.835	2.748.200	13,11	0	-
5.02.01.2.05	IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.775.856	-	0,00		

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	#DIV/0!	0	-
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	74.775.856	-	0,00	0	-
5.02.01.2.06	V. Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.900.036	98.644.440	29,19		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	11.221.440	44,89	1	100,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.250.000	21.133.235	42,06	1	33,33
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.845.022	13.161.048	49,03	0	-
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.647.866	6.050.000	51,94	1	100,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.469.473	17.878.437	34,07	0	-
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	427.200	-	0,00	0	-
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000	8.874.280	55,46	1	100,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.260.475	20.326.000	13,09	0	-
5.02.01.2.07	VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	872.798.455	-	0,00		
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.500.000	-	0,00	1	100,00
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	462.770.000	-	0,00	5	100,00
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	132.268.890	-	0,00	0	-
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.695.365	-	0,00	0	-
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.564.200	-	0,00	0	-
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	#DIV/0!	0	#DIV/0!

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
5.02.01.2.08	VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.358.510.053	113.600.668	8,36		
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.745.186	4.170.400	53,85	0	-
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.949.697	105.802.131	32,07	1	100,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.020.815.170	3.628.137	0,36	1	100,00
5.02.01.2.09	VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.094.036	97.124.262	22,90		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.610.958	13.353.950	33,71	1	100,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.732.829	56.140.312	32,13	6	100,00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.136.687	27.630.000	99,98	10	11,36
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.577.758	-	9,48	0	-
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.035.804	-	0,00	0	-
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.123.476.376	759.540.584	10,66		
5.02.04.02.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	7.123.476.376	759.540.584	10,66		
5.02.04.02.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	32.666.237	12.931.409	39,59	0	-
5.02.04.02.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	173.661.390	28.394.869	16,35	1	12,50

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
5.02.04.02.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	548.276.807	76.030.455	13,87	0	-
5.02.04.02.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	715.885.134	-	0,00	1	100,00
5.02.04.02.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	830.128.748	53.295.190	6,42	1	100,00
5.02.04.02.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.387.541.843	89.822.694	6,47	0	-
5.02.04.02.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.954.069	57.520.430	28,62	100	2,00
5.02.04.02.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	570.118.892	82.317.137	14,44	0	-
5.02.04.02.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	191.277.091	31.164.249	16,29	4	100,00
5.02.04.02.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	442.806.408	77.341.676	17,47	0	-
5.02.04.02.01.11	Penagihan Pajak Daerah	1.005.761.909	64.250.396	6,39	0	-
5.02.04.02.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	224.529.010	36.325.390	16,18	0	-
5.02.04.02.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	492.943.943	92.798.305	18,83	0	-
5.02.04.02.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	263.189.537	42.081.974	15,99	0	-
5.02.04.02.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	43.735.358	15.266.410	34,91	0	-
JUMLAH TOTAL		20.981.925.773	4.120.740.942	19,69		

2.3. Isu Penting Dalam Menjalankan Tugas Pokok OPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah/Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah
- b. Database potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum sempurna
- c. Pemahaman oleh sebagian masyarakat bahwa membayar pajak daerah masih dianggap sebagai beban dan belum dianggap kewajiban.
- d. Kepatuhan, ketaatan dan kejujuran wajib pajak relatif masih kurang
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan pajak
- f. Data tunggakan pajak masih besar

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur melakukan perubahan anggaran baik pergeseran

antar sub kegiatan maupun perubahan jumlah pagu antar sub kegiatan karena adanya penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan seperti :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
7. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
8. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
9. Penetapan Wajib Pajak Daerah
10. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diubah lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur merumuskan program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu :

Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kegiatan
 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.2. Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Rincian rencana Program dan kegiatan untuk Perubahan Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan)										
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKASANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKASANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	31.774.915.069	34.075.395.243	2.300.480.174
5	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Terselenggaranya tertib perencanaan penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	Terselenggaranya tertib perencanaan penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	62.849.824	62.849.824	-
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	2 Dok	2 Dok	7.847.514	7.847.514	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	8.379.027	8.379.027	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	8.106.855	8.106.855	

5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	6.975.342	6.975.342	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	15.000.000	15.000.000	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	3 Lap	3 Lap	8.187.479	8.187.479	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	8.353.607	8.353.607	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	100 Persen	100 Persen	7.900.465.136	9.363.966.639	1.463.501.503
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	7.355.984.766	8.819.486.269	1.463.501.503
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	261.845.376	261.845.376	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	203.146.800	203.146.800	
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	20.000.000	20.000.000	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	9.488.194	9.488.194	
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	20.000.000	20.000.000	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	2 Dok	2 Dok	15.000.000	15.000.000	

5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	15.000.000	15.000.000	
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	108.710.000	108.710.000	-
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	10.000.000	10.000.000	
5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	20.000.000	20.000.000	
5	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	27.600.000	27.600.000	
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	15.000.000	15.000.000	
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	36.110.000	36.110.000	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	203.947.962	203.947.962	-
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	121 Paket	121 Paket	55.642.880	55.642.880	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	5 Orang	5 Orang	148.305.082	148.305.082	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	443.391.451	443.941.451	550.000
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	4 Paket	4 Paket	32.798.103	32.798.103	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	3 Paket	3 Paket	78.636.726	78.636.726	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	4 Paket	4 Paket	11.066.132	11.616.132	550.000

5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	5 Paket	5 Paket	14.307.332	14.307.332	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	2 Paket	2 Paket	51.490.187	51.490.187	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	7.112.971	7.112.971	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Perundang-undangan dalam 12 Bulan	Perundang-undangan dalam 12 Bulan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	20.000.000	20.000.000	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	227.980.000	227.980.000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 Bulan	12 Bulan	846.344.846	1.159.619.266	313.274.420
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit	125.052.345	125.052.345	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit	460.540.000	460.540.000	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Lapangan yang dsediakan	Lapangan yang dsediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	32 Unit	32 Unit		-	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	17 Unit	17 Unit	155.437.501	155.437.501	
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan mesin yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit		313.274.420	313.274.420
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit	105.315.000	105.315.000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	21.909.346.544	22.322.500.795	413.154.251
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Laporan	1 Laporan	7.745.186	7.745.186	

5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Laporan	1 Laporan	20.282.359.513	20.282.359.513	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Laporan	1 Laporan	1.619.241.845	2.032.396.096	413.154.251
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	299.859.306	409.859.306	110.000.000
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	5 Unit	5 Unit	36.024.345	36.024.345	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	2 Unit	2 Unit	185.410.307	185.410.307	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	30 Unit	30 Unit	58.143.374	168.143.374	110.000.000
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	3 Unit	3 Unit	20.281.280	20.281.280	
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 Bulan	12 Bulan	5.097.571.279	5.490.571.279	393.000.000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 Bulan	12 Bulan	5.097.571.279	5.490.571.279	393.000.000
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	36.076.251	36.076.251	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	8 Dok	8 Dok	227.531.300	302.531.300	75.000.000

5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	385.726.312	585.726.312	200.000.000
5	02	04	2.01	04	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit	175.000.000	175.000.000	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak adan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak adan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	256.783.361	256.783.361	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	1.160.099.005	1.178.099.005	18.000.000
5	02	04	2.01	07	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	OP	OP	200.000.000	200.000.000	
5	02	04	2.01	08	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	425.135.800	475.135.800	50.000.000
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	Layanan	Layanan	196.400.000	246.400.000	50.000.000
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	10 Dok	10 Dok	246.967.935	246.967.935	
5	02	04	2.01	11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	1.038.800.400	1.038.800.400	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	209.274.300	209.274.300	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	206.164.587	206.164.587	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	281.019.684	281.019.684	

5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	52.592.344	52.592.344	
JUMLAH														36.872.486.348	39.565.966.522	2.693.480.174

BAB IV PENUTUP

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka rencana kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2025 ini dapat disusun.

Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 ini diharapkan nantinya dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2026. Renja ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 diucapkan terima kasih dan semoga upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur di tahun tersebut dapat berjalan lebih terarah dan terukur.

Selanjutnya Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten :Lampung timur tahun 2025 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur di lingkungan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur.

Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri, semoga segala usaha yang dirintis untuk mencapai kondisi ideal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung timur sebagaimana diharapkan dapat diwujudkan harapannya, Amin..

Sukadana, Juli 2025
KEPALA BADAN PENDAPATA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

AGUS FIRMANSYAH LUKMAN, S.E., M.M
Pembina Tk. I /IV.b
NIP. 19830829 200501 1 004